POLITIK IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF POLITISI TIONGHOA SURABAYA
(Studi Kasus di DPRD Kota Surabaya)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

MELINDA ADI PRATIWI
NIM: E74213140

PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Melinda Adi Pratiwi ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 2017

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid., M. Ag.
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:
Ketua,

Zaky Ismail, M.S.I
NIP. 198212302011011007

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I,

Dr. Slamet Muliono R, M.Si
NIP. 196811291996021003

Penguji II,

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag
NIP. 197206252005011007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Melinda Adi Pratiwi

NIM : E74213140

Jurusan : Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 98AF1ADF309103367 6000 ENAM RIBU RUPIAH

MELINDA ADI PRATIWI

NIM: E74213140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Melinda Adi Pratiwi ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 20 Juli 2017

Pembimbing,

Zaky Ismail M.S.I
NIP. 198212302011011007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MELINDA ADI PRATIWI
NIM : E74213140
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN / POLITIK ISLAM
E-mail address : jungls2828@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : POLITIK IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF POLITISI ~~ETNIS~~ TIONGHOA SURABAYA (Studi Kasus di DPRD Kota Surabaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(MELINDA A P)
namaterangdantandatangan

ABSTRAK

Istilah politik identitas memang sedikit asing di kalangan masyarakat. Banyak yang mengenal politik identitas sebagai politik solidaritas sesama suku. Politik identitas biasanya ditunjukkan dengan memilih calon yang memiliki latar belakang sama pada setiap pemilihan umum. Hal ini biasa dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan penghargaan sesama dalam etnis. Di sisi lain, praktik politik identitas ini muncul karena adanya ketidakadilan dan diskriminasi kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa kepada kelompok tertentu. Politik identitas ini dipandang sebagai jalan untuk membebaskan kelompok tersebut dari diskriminasi yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok yaitu (1) Pandangan politisi etnis Tionghoa terhadap politik dentitas; (2) Posisi politisi etnis Tionghoa dalam pengambilan kebijakan; (3) Representasi politisi Tionghoa sebagai wakil rakyat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling,* yaitu menentukan sampel berdasar pertimbangan tertentu dan menggunakan teknik *indepth interview.* Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama,* politisi etnis Tionghoa menganggap bahwa politik identitas merupakan hal yang manusiawi dilakukan, namun dalam tindak lanjut politisnya, politik identitas ini tidak bisa dijadikan kunci untuk mereka dalam memonopoli kekuasaan. *Kedua,* dalam setiap pengambilan keputusan, etnis Tionghoa selalu mengikuti tupoksi yang ada. Mereka tidak hanya memperjuangkan Tionghoa saja, mereka juga memperjuangkan hak warga Surabaya. Hal tersebut mereka tuangkan dalam berbagai macam kebijakan dan kegaiatan langsung dalam masyarakat. *Ketiga,* politisi etnis Tionghoa mencoba untuk merepresentasikan diri sebagai politisi dari kalangan Tionghoa dengan cara pendekatan sosial. Hal ini dilakukan agar mampu menghapuskan stigma masyarakat terhadap politisi etnis Tionghoa yang selama ini dianggap tidak mampu untuk berpolitik.

Kata Kunci: Politisi Etnis Tionghoa, Politik Identitas, Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Konsep 7
F. Penelitian Terdahulu 9
G. Metode Penelitian 17
H. Lokasi Penelitian 19
I. Jenis dan Sumber Data 20
J. Teknik Pengumpulan Data 21
K. Metode Analisis 23
L. Teknik Pengabsahan 24

BAB II KERANGKA TEORI

A. Politik Identitas 26
B. Etnisitas 30
C. Sejarah Politik Identitas di Indonesia 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III SETTING PENELITIAN

A. Sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia.....37

B. Sejarah Politik Etnis Tionghoa di Indonesia.....38

C. Politik Etnis Tionghoa.....43

1. Kebangkitan Politik Etnis Tionghoa di Surabaya 45
2. Masa Awal-Akhir Kolonialisme Belanda.....46
3. Akhir Kolonialisme Belanda dan Awal Kolonialisme Jepang….49
4. Masa Proklamasi Indonesia……..50
5. Masa Orde Lama-Orde Baru…….51
6. Masa Reformasi-Sekarang……53

D. Politik Identitas Tionghoa di Surabaya……...55

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Politik Identitas 59

1. Politik Identitas di Surabaya.....61
2. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Surabaya 71

B. Politisi Etnis Tionghoa di Surabaya.....73

1. Representasi Kepada Masyarakat…….77
2. Posisi dalam Pengambilan Keputusan Legislatif…….78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....83

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah multikultural muncul sebagai suatu pandangan mengenai keanekaragaman yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini ditandai dengan penerimaan atas perbedaan budaya yang dimiliki oleh setiap individu. Multikulturalisme juga dapat dipandang sebagai suatu sistem atas perilaku dan kepercayaan yang menghargai adanya perbedaan sosial budaya suatu kelompok dalam suatu lingkungan dengan tujuan memberdayakan semua pihak dalam masyarakat.[1]

Indonesia merupakan negara dengan tingkat multikultur yang tinggi. Banyak masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai macam etnis yang berbeda-beda. Banyaknya etnis yang ada tidak jarang menimbulkan adanya suatu pengelompokan, pengucilan bahkan konflik. Bahkan dari sisi politis pun, tak jarang masyarakat dalam memilih akan melihat suatu calon yang maju dari sisi latar belakang budaya dan etnis yang melekat pada dirinya.

Etnis Tionghoa memang telah lama vakum dari dunia politik. Meski bukan merupakan hal baru dalam dunia politik, kehadiran etnis Tionghoa dalam bidang politik selalu menjadi hal yang menarik. Strereotipe mengenai masyarakat etnis ini yang selalu dikaitkan dengan penguasa modal dan sikap

[1] Caleb Rosado, "*Toward a Definition of Multiculturalism*", *Journal for Change in Human System*, (Oktober, 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individualis yang kuat dirasa berbanding terbalik dengan pandangan mengenai sikap politik mereka. Meski jumlah populasi masyarakat Tionghoa tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, pandangan mengenai etnis ini tetap sama.

Dari sisi historis, etnis Tionghoa dibagi ke dalam tiga corak pemikiran politik. Yang pertama adalah integrasionis. Kaum ini merupakan Etnis Cina Indonesia (ECI) yang masih teguh memegang identitasnya sebagai tionghoa peranakan. Kaum ini berpendapat bahwa asimilasi total dari Tionghoa peranakan ke dalam bangsa Indonesia hanya dapat terjadi kalau Indonesia menjadi Negara sosialis di mana tak ada penguasaan manusia atas manusia. Jika mayarakat semacam itu belum terwujud, mereka ingin tetap menjadi Tionghoa yang tetap berinteraksi. Namun dalam hal ini, mereka lebih menginginkan untuk berinteragsi dalam partai politik yang revolusioner milik para pemimpin radikal. Orang modern memandang diri mereka sebagai warga bangsa Indonesia, tetapi ingin tetap menjadi peranakan Tionghoa tanpa terlibat dalam pergerakan revolusioner. Walaupun pandangan itu sama-sama memiliki konsep kebangsaan Indonesia yang non-rasial.[2]

Kedua adalah asimilasionis, yaitu Etnis Tionghoa yang menginginkan adanya peleburan etnis Tionghoa dengan masyarakat etnis pribumi. Kaum ini banyak muncul saat kepemimpinan Suharto. Hal ini disebabkan karena pandangan kaum pribumi tentang etnis Tionghoa yang buruk pada masa itu.

[2] Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina Dalam Proses Pembauran di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Insan, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditambah lagi munculnya isu-isu rasial dan tindakan diskriminasi yang diterima oleh etnis ini membuat beberapa tokoh besar dari etnis ini mulai bergabung dengan partai-partai pribumi. Tujuannya adalah untuk memunculkan aspirasi baru dan keputusan baru mengenai etnisnya.[3]

Terakhir yaitu cukong. Cukong adalah sebutan bagi etnis Tionghoa pedagang yang memiliki hubungan dengan elite penguasa. Dalam pengertiannya kaum ini mulai membedakan diri mereka dengan menegaskan kepada "siapa" mereka berdasarkan pekerjaan dan profesi. Kaum ini mendefinisikan diri mereka secara global dan memandang diri mereka sebagai kaum pekerja dengan tingkat profesionalitas yang sangat tinggi. Dalam kaum ini terdapat nilai bahwa dengan jaringan sosial yang dimiliki mampu mengurangi arti identitas dan budaya yang melekat. [4] Ketiganya memiliki cara politik yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Faktor migrasi di era kolonialisme dan asimilasi dengan budaya lokal setempat mengakibatkan adanya ketersinggungan etnis ini dengan dunia politik.[5]

Lantas, adanya ketersinggungan antara etnis Tionghoa ini bukan hanya disebabkan dari sisi rasisme saja. Namun dari sisi politis, etnis ini mendapatkan tempat yang terbatas. Anggapan bahwa etnis ini merupakan warga dunia nomor dua setelah bangsa kulit putih menimbulkan pemikiran bahwa etnis ini juga merupakan salah satu bagian dari penjajah. Padahal hal

---

[3] *Ibid*
[4] *Ibid*, 64-65
[5] *Ibid* 56-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini hanya merupakan bentuk dari politik pecah belah atau *divide et empera* yang dilakukan oleh Belanda.

Sampai pada Orde Baru etnis Tionghoa terus mendapatkan tindakan diskriminatif bahkan yang berasal dari pemerintah Indonesia. Diterbitkannya Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang berisi tentang perintah penggantian nama bagi etnis ini dari nama yang berbau Cina menjadi nama yang lebih Indonesia. Penggunaan bahasa Cina pada saat itu pun dibatasi bahkan dilarang.[6]

Tindakan diskriminatif ini menyebar sampai pada tingkat dimana etnis ini tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam segala aktivitas politik. Seni budaya seperti barongsai dan perayaan imlek juga dilarang pada masa itu. Hal ini semakin menambah ketakutan dan kekhawatiran etnis ini akan kehidupan mereka. Puncaknya adalah saat reformasi tahun 1998 dimana etnis Tionghoa juga menjadi korban penjarahan dan aksi-aksi kriminalitas lainnya. Namun setelah itu, perlahan mereka mulai berani untuk bangkit dan memperjuangkan hak-haknya.

Munculnya berbagai polemik mengenai identitas tersebut, menyebabkan munculnya suatu istilah atau studi mengenai politik identitas. Politik identitas dipahami sebagai suatu tindakan politis yang mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota atau kelompok yang memiliki kesamaan latar belakang yang berbasis ras, agama etnis atau gender.[7]

---

[6] Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2010), 72
[7] Triyono Lukmantoro, *Kematian Politik Ruang* (Jakarta: Kompas, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan etnis Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi. Banyak penggerak perubahan dan pejuang yang berasal dari etnis ini. Meski etnis ini juga memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan di Indonesia, saat ini etnis Tionghoa yang sebelumnya banyak bergerak dalam berbagai bidang ekonomi, mulai merambah bidang politik.

Di Surabaya sendiri banyak politisi yang berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa menempati tiga kursi dalam DPRD Kota Surabaya dan satu kursi dalam DPRD Jawa Timur. Kehadiran etnis Tionghoa dalam legislatif juga menjadi semacam angin segar bagi masyarakat yang berasal dari latar belakang yang sama. Di sisi lain hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi anggota yang berasal dari etnis Tionghoa dalam penyelesaian masalah yang ada di wilayah Surabaya.

Terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memang memiliki ragam etnis dan budaya yang sangat kental, maka kajian mengenai politik identitas ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Melihat pula banyaknya fenomena-fenomena politik yang berkaitan erat dengan politik identitas yang banyak muncul saat ini sebagai dampak dari adanya politik praktis.

Selanjutnya dari hasil penelitian akan dikembangkan mengenai pemikiran tentang bagaimana representasi yang dimunculkan anggota legislatif etnis Tionghoa mengenai keikutsertaannya dalam bidang legislasi. Dan memberikan suatu pengetahuan baru mengenai bagaimana anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif DPRD Kota Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa memposisikan diri mereka dalam pengambilan kebijakan Kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan politisi etnis Tionghoa mengenai politik identitas?
2. Bagaimana politisi etnis Tionghoa menempatkan posisinya dalam proses pengambilan kebijakan?
3. Bagaimana representasi yang dimunculkan anggota DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat?

C. Tujuan

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan politisi etnis Tionghoa Surabaya mengenai politik identitas beserta praktiknya di lapangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan identitas multikultural anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa terhadap proses pengambilan kebijakan yang dibuat dalam proses legislatif.
3. Mendeskripsikan bagaimana interpretasi anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa sebagai wakil rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur mengenai pandangan politik politisi yang berasal dari etnis Tionghoa. Selama ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian mengenai politik etnis Tionghoa hanya sekedar meliputi hal yang berhubungan dengan ketidak-adilan atau keterwakilan etnisnya dalam lingkup politik. Namun dalam skripsi ini penulis mencoba untuk menggali bagaimana politisi etnis Tionghoa Surabaya memaknai identitasnya sebagai wakil rakyat. Kemudian bagaimana representasi mereka dalam lingkup yang sedang mereka jalani. Dari sini kita akan mengetahui bagaimana perspektif seorang Tionghoa itu dalam menjalani aktivitas politiknya.

Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat lain, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengertian, pandangan atau teori baru mengenai politik identitas etnis Tionghoa sebagai wakil rakyat.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai politik identitas etnis Tionghoa sebagai wakil rakyat.

E. Definisi Konsep

1. Politik Identitas

Politik identitas dalam hal ini merujuk pada bentuk partisispasi individu dalam politik yang ditentukan oleh budaya dan psikologi seseorang. Menurut Emanuel Castells, “Politik identitas ini dapat menjadi suatu alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjuangan yang digunakan oleh suatu etnis tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap sebagai suatu ketidakadilan politik."[8]

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan politik identitas adalah tentang bagaimana penyikapan dan penempatan diri politisi dari etnis Tionghoa yang menjabat di DPRD Kota Surabaya mengenai perbedaan etnis yang ada dan dalam hal pengambilan keputusan.

2. Politisi Etnis Tionghoa

Politisi merupakan bentuk jamak dari politikus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Politikus berarti ahli politik atau ahli kenegaraan. Politikus juga dapat dipahami sebagai seorang yang berkecimpung di dunia politik.[9]

Sedangkan etnis Tionghoa pada awalnya disebut sebagai Cina atau orang Cina dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian penggunaan kalimat Cina ini berubah seiring dengan adanya latar belakang yang memiliki konotasi buruk dengan kata Cina, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2014 memutuskan untuk kembali menggunakan sebutan Tionghoa.[10]

Etnis tionghoa sendiri dapat dipahami sebagai imigran yang berasal dari Tiongkok yang kemudian tinggal dan menetap di Indonesia. mereka tetap memiliki marga yang diwariskan oleh keluarganya, namun mereka tidak

---

[8] *Ibid*, 20.

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/politikus (Kamis, 10 Nopember 2016, 19.00)

[10] Benny G. Setiono, http://lkassurabaya.blogspot.co.id/2007/07/cina-tionghoa-dan-tiongkok.html "Cina, Tionghoa dan Tiongkok" (Kamis, 10 Nopember 2016, 18.55)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang kewarganegaraannya.[11] Di sisi lain, etnis Tionghoa ini layaknya hanya memiliki darah dan tradisi Tiongkok di dalam dirinya, namun tetap memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan politisi etnis Tionghoa adalah seluruh politisi yang menjabat dalam DPRD Kota Surabaya yang memiliki keturunan atau berasal dari etnis Tionghoa.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai informasi awal dan sebagai penentuan fokus awal dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yusfirlana Nuri Ma'rifah dan Warsono yang berjudul Orientasi Politisi Etnis Cina di Kota Surabaya pada Pemilu 2004 dan 2009. Dalam penelitian tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui orientasi politisi etnis Cina di Kota Surabaya pada pemilu 2004 dan pemilu 2009.

Penelitian tersebut kemudian menjelaskan bahwa orientasi politik politisi keturunan Cina di Surabaya pada pemilu 2004 dan 2009 meliputi latar belakang yaitu keinginan untuk merubah undang-undang yang diskriminatif. Kemudian adanya pengaruh keluarga yang sama-sama memiliki latar belakang sebagai politisi dan keinginan untuk berkontribusi agar merubah Surabaya menjadi kota yang lebih baik.

Sedangkan orientasi politisi etnis cina yang ada di Surabaya meliputi perubahan undang-undang atau perda yang dianggap diskriminatif terhadap etnis cina atau masyarakat kelas bawah. Adanya keinginan untuk menerapkan

[11] Yusie Liem, *Prasangka Terhadap Etnis Cina* (Jakarta: Djambatan, 2000), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila secara baik dan konsekuen bagi warga kota Surabaya. Kemudian keinginan untuk merubah kota Surabaya enjadi kota yang lebih baik dan kondusf.

Dalam penelitian tersebut tergambarkan beberapa karakteristik dan informasi mengenai bagaimana politisi yang berasal dari Etnis Tionghoa memposisikan diri mereka sebagai wakil rakyat dan juga sebagai warga keturunan Tionghoa yang menginginkan adanya kesetaraan tidak hanya bagi etnisnya tetapi juga bagi warga kelas bawah.

Selanjutnya adalah penelitian M. Fajar Ismail yang berjudul Liberalisasi Politik Etnis Tionghoa. Dalam penelitiannya ini didapatkan hasil bahwa keikutsertaan Etnis Tionghoa dalam ranah politik terutama di Surabaya dimulai pada pemilu tahun 2004. Hal ini ditunjukkan dengan adanya anggota DPRD yang berasal dari etnis Tionghoa. Pada periode sebelumnya tidak pernah didapati anggota DPRD yang berasal dari etnis Tionghoa.

Partisipasi politik etnis Tiongoa yang bermukim di Surabaya dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipas politik aktif ditunjukkan dengan keikutsertaan mereka dalam pemilu dan mulai munculnya organisasi-organisasi yang bernuansa Tionghoa seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya (PMTS).

Sedangkan partisipasi politik pasif masyarakat Tionghoa ditunjukkan dengan mengadakan organisasi yang bergerak di bidang sosial. Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tidak berpartisipasi langsun dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, namun mereka lebih nyaman apabila bergerak secara kelompok.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik disebebkan karena adanya faktor lingkungan sosial politik yang ada di sekitarnya. Hasil penelitian beliau menunjukkan adanya tindakan diskriminasi yang pernah diterima saat sebelum menjadi anggota DPRD Kota Surabaya menjadi pemicu. Keinginan untuk mendapat pengakuan dan kesetaraan begitu besar. Selain itu faktor keluarga juga menjadi alasan mengapa mereka mau terlibat dalam dunia politik.

Dalam penelitian ini kemudian didapati bahwa dalam pengambilan keputusan, anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa tidak membeda-bedakan masyarakat dengan alasan apapun. Respon performa mereka selama menjadi anggota DPRD juga beragam. Ada yang memandang bahwa hadirnya anggota DPRD yang berasal dari Etnis Tionghoa ini mampu membuka jalan bagi etnis lain untuk berani tampil dalam bidang politik. Meski ada beberapa juga yang menganggap remeh kinerja mereka dan menganggap bahwa keikutsertaan etnis Tionghoa dalam politik hanya sebagai jembatan untuk memperluas dan memperkuat bisnis mereka.

Politik identitas dipandang sebagai suatu praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok bukan praktik politik yang berbasis kepentingan. Politik identitas ini biasanya muncul bukan karena adanya sistem politik tertentu, tapi karena adanya celah untuk mengekspresikan kebebasan. Selain itu, munculnya politik identitas di Indonesia ini diakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh adanya teritorialisasi identitas dengan adanya pembentukan daerah administratif di beberapa wilayah.

Identitas sendiri dianggap sebagai suatu hasil dari konstruksi sosial yang berasal dari pengalaman yang bersifat subjektif dan intersubjektif. Di sisi lain identitas dianggap sebagai sebuah penanda yang diperoleh melalui asal usul keturunan dan bersifat "given".

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa politik identitas dan konflik memiliki hubungan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Alasannya adalah adanya proses asimilasi yang menyebabkan percampuran pemikiran dan keinginan untuk "bebas". Berkembangnya praktek politik berbasis identitas tidak dapat dicegah jika tidak ada ruang bagi perbedaan. Namun apabila politik identitas ini dibiarkan berkembang begitu saja, kemungkinan untuk terjadi suatu kehancuran dan konflik dalam tatanan sosial besar.

Penulis menjelaskan bahwa untuk menghadapi benturan yang diakibatkan oleh adanya politik identitas adalah dengan adanya multikulturalisme. Multikulturalisme disini dianggap mampu mentransformasikan konflik yang terjadi antar etnis namun tetap menjamin prinsip demokrasi dan HAM.[12]

Politik identitas yang ada di Indonesia banyak dilator belakangi oleh masalah agama. Selain itu ada yang menyangkut pautkan ideologi politik di dalamnya. Gerakan Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka adalah

[12] Purwanto, "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif", Jurnal Review Politik Vol. 05, No. 01, Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa contoh akibat adanya politik identitas. Etnis-etnis tersebut merasa bahwa mereka tidak adil kan politik yang lebih disentralkan pada ibukota.

Beberapa hal lain yang menyebabkan munculnya politik identitas di Indonesia adalah antara lain karena adanya ketidakpuasan akan adanya sistem yang berlaku di Indonesia. Seperti contohnya gerakan FPI yang dilatarbelakangi oleh adanya ketidak adilan yang diterima oleh kaum muslim yang ada di Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sebenarnya politik identitas ini tidak membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Namun dengan syarat bahwa adanya politik identitas ini tidak menghapus atau mengesampingkan cita-cita pendiri bangsa yang terintegrasi dalam Pancasila, Sumpah Pemuda, dan filosofi-filosofi negara yang lainnya.[13]

Dalam jurnalnya Kamaruddin menyatakan bahwa etnisitas di tingkat lokal memiliki peluang yang amat besar apalagi di bidang politik. Dengan pengaruh dari kepentingan politik nasional, isu etnisitas ini menjadi isu yang paling mudah untuk dimasuki. Apalagi dengan banyaknya sentiment-sentimen etnis yang muncul karena perbedaan etnis. Etnis yang tergolong dalam minoritas akan menggunakan etnis sebagai alat untuk mempertahankan eksistensinya.

Politik etnis yang ada di Maluku sendiri dinilai muncul karena adanya latar belakang etnis dan daerah yang terikat dalam tiap calonnya. Sentimen

[13]Ahmad Syafii Maarif, "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita" (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan perebutan kursi di pemerintahan ini yang banyak terjadi di Maluku. Etnis-etnis yang selalu dominan dalam menduduki kursi pemerintahan Maluku antara lain etnis Makean, Tidore, Ternate, Sanana dan Togale.

Kamaruddin menambahkan bahwa identitas dalam politik di Maluku Utara ini diakibatkan oleh adanya hubungan antara agen dan aktor dalam struktur politik. Mengambil teori strukturasi Anthony Giddens, beliau berpendapat bahwa hubungan aktor dan struktur merupakan relasi dalam struktir yang menjadi kebiasaan. Dalam hal ini, provinsi Maluku Utara merupakan daerah otonom baru. Dengan munculnya provinsi ini menjadikan etnis-etnis mayoritas tersebut mulai memperebutkan siapa yang berhak memimpin di Maluku Utara. Akan tetapi, setelah melewati tahapan-tahapan kelompok-kelompok etnis tersebut mulai digantikan perannya oleh LSM dan Mahasiswa. Munculnya LSM ini sebagai penengah diantara etnis-etnis tersebut.

Politik identitas yang muncul di Maluku Utara yang berkembang saat ini lebih dipengaruhi oleh penguatan ego atas budaya dan etnis yang ada. Mengambil pendapat Giddens, beliau menunjukkan bahwa kemunculan etnis yang dominan dalam pemilu atau perpolitikan di Maluku Utara merupakan kondisi objektif etnisistas yang merasa bahwa mereka memiliki peluang dan hal tersebut tidak melanggar konstitusi atau cita-cita demokrasi langsung.

Konstruksi politik identitas etnis yang menampilkan etnis tertentu di Maluku Utara memiliki tujuan untuk mengontruksi etnisitas sebagai upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggeser kekuatan elit kesultanan dan birokrat yang selama ini dominan dalam perpolitikan di Maluku Utara.[14]

Dalam jurnal ini Jumaidi membahas mengenai keterwailan politik etnis Dayak dan Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Beliau mengambil kesimpulan Gurr yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang menentukan etnis melakukan kegiatan politik. Faktor pertama yaitu besar penderitaan kelompok tersebut dibanding kelompok lain. Kedua, kuatnya perasaan identitas kelompok, ketiga yitu mobilisasi kelompok dan yang terakhir merupakan kontrol represif dari kelompok dominan.

Dalam kehidupan politik di Kalimantan Barat, etnis Dayak dinilai bersifat agresif dan asertif. Dimana hampir semua pemilihan umum yang ada dikuasai atau dimenangkan oleh etnis Dayak. Hal ini menyebabkan etnis Melayu juga ingin menandingi etnis Dayak.

Politik identitas di Kalimantan Barat muncul karena empat faktor. Pertama yaitu faktor struktural dan momentum. Pada masa orde baru, masyarakat asli Kalimantan merasa termarginalkan karena kebijakan pembangunan yang tidak seimbang. Adanya otonomi daerah kemudian menyebabkan ledakan tuntutan masyarakat lokal dalam hal menuntut hak-hak sosialnya. Di Kalimantan Barat sendiri masyarakat etnis Dayak merupakan etnis yang vokal dalam menyuarakan hak-haknya dibanding etnis Melayu.

[14] Kamaruddin Salim, "Politik Identitas di Maluku Utara" Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 11, No. 02, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua yaitu keterwakilan kepemimpinan politik yang tidak seimbang. Kepemimpinan yang selama ini ada di Kalimantan Barat selalu diliputi leh hal-hal seperti agama, etnis dan lainnya yang menyebabkan kedua etnis ini (Dayak dan Melayu) mencoba untuk mempertahankan posisi politik yang mereka miliki.

Ketiga, adalah adanya persekongkolan politik elit lokal dan pusat untuk membangkitkan isu etnis dan agama. Selama ini simbol-simbol etnis selalu digunakan dalam proses kampanye untuk menarik dukungan politik. Membanding-bandingkan dua etnis atau agama bukan merupakan hal yang asing di Kalbar.

Faktor keempat adalah munculnya prasangka dan stereotip etnik. Orang Dayak selalu menganggap apabila orang Melayu yang memimpin Kalimantan Barat, pasti mereka akan lebih mementingkan etnis dan kaum yang seagama dengan mereka, begitu pula sebaliknya.

Pada kesimpulannya beliau menyatakan bahwa dalam persaingan politik yang ada di Kalimantan Barat, keterwakilan etnis yang ada bisa dikatakan seimbang. Meski kedua etnis (Dayak dan Melayu) sama-sama memiliki keinginan besar untuk menguasai atau mengamankan posisi masing-masing dalam politik, mereka memiliki kekuasaan yang setara. Dayak dengan keberhasilannya dalam kepemimpinan di Kalimantan Barat meskipun etnis Melayu juga menduduki posisi strategis seperti ketua parpol dan sebagainya. Namun di beberapa sisi memang masih menunjukkan sisi kuat etnis Dayak dibanding etnis Melayu. Meski telah dibentuk berbagai macam paguyuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk meredam ketegangan kedua etnis, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pengaruh etnis dan agama dalam kehidupan politik di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan begitu saja.[15]

Beberapa penelitian di atas dapat menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan peneliti yang akan meneliti mengenai bagaimana politisi yang berasal dari etnis Tionghoa tersebut memahami identitasnya sebagai wakil rakyat dan sebagai etnis Tionghoa dalam proses pengambilan keputusan.

Dari beberapa penelitan yang disebutkan diatas tersebut peneliti menemukan bahwa peneliti-peneliti sebelumnya membahas politik identitas ini secara umum. Misalnya saja menyebutkan bahwa keikutsertaan dalam politik adalah berdasarkan dorongan untuk ketidakadilan yang diterima etnisnya, benturan karena ego yang didasari oleh etnisitas dan keterwakilan.

Penulis belum menemukan pembahasan mengenai bagaimana politisi Tionghoa memaknai politik identitas. Kemudian juga penulis belum menemukan bagaimana wakil rakyat yang berasal dari suatu etnis yang dianggap minoritas ini dalam merepresentasikan diri mereka dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan penelitian ini penulis merasa bahwa perlu untuk membahas tentang bagaimana politisi yang berasal dari etnis minoritas, atau dalam penelitian ini etnis Tionghoa, memaknai bagaimana politik identitas tersebut. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

[15] Jumaidi, "Keterwakilan Etnis Dalam Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru", Jurnal Demokrasi dan Otonomi daerah, Vol. 11, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif mencakup masalah murni tentang pengalaman orang atau objek yang ada di lingkungan penelitian.[16] Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Sedangkan David William dalam Lexy Moeleong, menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik tertarik secara alamiah."[17]

Penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa ada banyak perspektif yang dapat diungkapkan. Fokusnya ada pada fenomenal dan pada perasaan atau persepsi dari partisipan studi.[18]

Jadi, apabila dipahami secara umum, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlatar alamiah dengan keinginan peneliti

---

[16] Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 174
[17] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 4-5.
[18] Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meneliti hal yang ingin diteliti secara alami dan tanpa paksaan untuk menghasilkan data yang dituangkan dalam bentuk deskriptif dari orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru dengan penjabaran secara rinci dan objektif berdasar data yang didapatkan dari wawancara langsung dan pengumpulan data sekunder yang didapat dari objek.

Penelitian yang dilakukan dalam kasus ini menggunakan metode wawancara langsung kepada anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi tertentu.[19] Selain itu, studi kasus dipahami sebagai suatu metode yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam tentang individu dan interaksi sosialnya dengan individu, kelembagaan dan komunitas lainnya dalam masyarakat.[20]

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan bagaimana politisi yang berasal dari etnis Tionghoa di Surabaya memahami identitasnya sebagai seorang Tionghoa, dan bagaimana politisi tersebut merepresentasikan diri mereka sebagai seorang wakil rakyat.

---

[19] *Ibid*, 20.

[20] http://nurhibatullah.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-jenis-dan-tujuan-studi-kasus.html (Kamis, 13 Oktober 2016, 19.45)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 18-22, Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena dalam struktur keanggotaan DPRD Surabaya memiliki anggota yang berasal dari etnis Tionghoa sebanyak tiga orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah di DPRD Jawa Timur yang hanya satu orang saja jelas bahwa hasil penelitian akan lebih objektif. Karena sumber didapatkan dari tiga perspektif yang berbeda.

I. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari subjek-subjek data yang diperoleh. Penggolongannya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Primer

   Sumber primer merupakan suber data utama dari penelitian ini. Sumber ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan. Informan sendiri adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi latar penelitian.[21]

   Subjek penelitian merupakan informan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[22]

[21] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2009) 132.
[22] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, informan atau sasaran pengamatan yaitu dua anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa. Pemilihan subjek didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan dan informasi yang didapatkan dari pihak protokoler kantor DPRD Kota Surabaya didapati dua subjek penelitian. Kedua anggota DPRD Kota Surabaya tersebut adalah :

1. Vinsensius, S.S. dari partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Baktiono, S.S. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data penunjang untuk melengkapi data sumber primer. Sumber sekunder ini didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut :

1. Pengurus parpol yang menaungi ketiga sumber primer
2. Beberapa anggota DPRD Kota Surabaya bukan dari etnis Tionghoa
3. Warga Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa dan warga Surabaya non Tionghoa

Data tambahan sumber ini juga bersumber dari buku, jurnal, dokumentasi, atau laman internet yang sesuai dengan tema yang dimaksud dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumulan data dilakukan pada seting alamiah dan banyak dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi.[23]

Observasi didefinisikan sebagai sebuah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau suatu hal. Obserbvasi merupakan cara pengambilan data dengan tanpa bantuan alat. Proses observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan dapat dilakukan secara terang-terangan atau dapat dilakukan dengan cara tidak terstuktur. Objek yang diobservasi merupakan tempat dimana terjadi interaksi sosial di dalamnya, akror yang melakukan peran tertentu dan aktivitas yang terjadi dalam tempat yang dimaksud.[24]

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai data awal penelitian maupun data lanjutan sebagai hasil penelitian.[25]

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai informasi tambahan atau pendukung untuk melengkapi hasil

---

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 307.
[24] *Ibid*, 310-314.
[25] *Ibid*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dan observasi yang dilakukan agar data yang dihasilkan bersifat akurat.[26]

Sehingga teknik pengumpulan data dipahami sebagai suatu cara untuk memperoleh data dan dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan observasi, wawancara langsung, kemudian dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan data kami mengunakan wawancara dan dokumentasi yang meliputi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber, dan data yang diproleh dari narasumber. Data juga didapatkan dari hasil literasi buku-buku, jurnal serta halaman internet yang relevan.

K. Metode Analisis

Analisa data merupakan proses dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Data yang diperoleh bisa berasal dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan dan dokumentasi lapangan.[27]

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang terkumpul telah jenuh dan lengkap. Teknik analisis data dibagi menjadi tiga, yaitu:[28]

1. Reduksi data

   Dalam tahapan ini peneliti harus merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Proses reduksi dilakukan agar data yang

[26] Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 93.
[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 335.
[28] *Ibid*, 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

2. Penyajian data

   Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif peneliti menyajikan data dengan teks naratif yang berisi mengenai uraian singkat. Penyajian data ini bertujuan agar peneliti mudah dalam menganalisa data yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan dan verivikasi

   Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti harus didukung dengan data-data dan bukti yang kuat yang mendukung keabsahan kesimpulan sehingga didapatkan hasil yang kredibel. Setelah dilakukan penarikan kesmpulan dilakukan verivikasi yang berfungsi agar data yang disajikan benar-benar sesuai.

Analisis data akan dimulai dengan pengambilan data primer dengan wawancara langsung kepada informan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.[29]

L. Teknik Pengabsahan

[29] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keabsahan data dapat dilakukan setelah semua data yang dimaksud terkumpul. Data tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu data lapangan dan data jadi. Data lapangan merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data lapangan ini juga bisa disebut sebagai data mentah. Dalam penelitian ini, data mentah yang dimaksud adalah berupa data lisan subjek, data tertulis serta foto. Data lisan tersebut didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan subjek penelitian. Data foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal atau kejadian yang terjadi pada saat proses observasi maupun wawancara atau pengumpulan data. Data lisan didapat dan didokumentasikan dalam bentuk rekaman suara. Sedangkan data tertulis didokumentasikan dengan bentuk catatan penelitian.[30]

Selanjutnya adalah data jadi. Data jadi merupakan data mentah yang didapatkan di lapangan namun telah mengalami beberapa penyeleksian data yang mengacu kepada permasalahan yang ingin dipecahkan yaitu objek penelitian.[31]

Teknik deskriptif eksplanatif adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan data dalam penelitian ini. Teknik deskriptif eksplanatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan tentang situasi atau fenomena sosial secara detil dan mampu menjelaskan mengenai fenomena yang akan diteliti.[32]

---

[30] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 18.
[31] *Ibid*, 19.
[32] https://asropi.wordpress.com/tag/eksplanatif/ (Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 20.15)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Politik Identitas

Identitas memiliki banyak pengertian tergantung bagaimana identitas itu digunakan. Identitas dapat dipandang sebagai suatu cap terhadap suatu bangsa. Namun di sisi lain identitas juga dapat digunakan sebagai penanda untuk mengidentifikasi diri mereka terhadap orang lain.[1]

Di lain pihak, identitas dipahami sebagai alat untuk mencirikan ide seperti individualitas. Dan hal tersebut juga dapat mengacu pada kualitas kesamaan dengan memungkinkan orang mengasosiasikan dirinya sendiri atau diasosialisasikan oleh orang lain dengan grup tertentu karena kesamaan yang dimilikinya.[2]

Klapp menyatakan bahwa identitas merupakan segala hal pada seseorang yang dapat menyatakan secara sah dan dapat dipercaya mengenai dirinya sendiri, status, nama, kepribadian dan masa lalunya. [3] Ada pula yang menyebutkan bahwa identitas merupakan suatu hal yang hakiki yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Hal tersebut tidak bisa begitu saja dihapuskan walaupun dengan alasan apapun.

---

[1] H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 16.
[2] La Ode, *Etnis Cina Indonesia dalam Politik* (Jakarta: Yayasan Obor , 2012), 39.
[3] *Ibid*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun di masa sekarang ini, politik identitas tidak hanya diartikan sebagai suatu bentuk perjuangan karena adanya ketidakadilan atau tidak adanya keterwakilan etnis tertentu dalam politik. Politik identitas juga dapat dipahami sebagai suatu dorongan individu untuk memilih calon yang memiliki latar belakang yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya simpati dan solidaritas antara sesama individu dalam suatu etnis. Fuad Hasan dalam Benyamin Molan menyebutkan hal ini sebagai terminologi kekitaan atau kekamian. Terminologi kekamian ini dipahami sebagai sebuah pemahaman bahwa seorang individu dapat sejalan dengan mereka yang memiliki keyakinan atau latar belakang yang sama dengan yang mereka miliki. Sedangkan mereka akan menganggap orang atau kelompok lain yang bertentangan keyakinan atau latar belakang mereka sebagai saingan atau musuh yang harus ditaklukkan. Terminologi ini tidak hanya berlaku dalam bidang politik saja, tapi juga bidang lainnya.[4]

Berdasarkan pembentukannya, identitas dibagi menjadi tiga perspektif yaitu primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme. Primordialisme menerangkan bahwa identitas terbentuk secara alami dan bersifat turun-temurun. Konstruktivisme memandang bahwa identitas dibentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas terbentuk karena adanya proses sosial yang kompleks. Sedangkan

[4] Benyamin Molan, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2015), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instrumentalisme memandang bahwa identitas merupakan alat yang dikonsruksikan untuk kepentingan elit dan menekankan pada aspek kekuasaan.

Politik identitas sendiri sangat berbeda dengan identitas politik. Identitas politik dipahami sebagai sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam suatu ikatan politik. Bagaimana subjek tersebut mampu menampilkan diri dalam segala hal yang mampu membuatnya dipandang menjadi seseorang yang berpengaruh dan bermanfaat bagi semua orang.[5]

Sedangkan politik identitas sendiri dipandang sebagai suatu praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok bukan praktik politik yang berbasis kepentingan. Politik identitas ini biasanya muncul bukan karena adanya sistem politik tertentu, tapi karena adanya celah untuk mengekspresikan kebebasan. Selain itu, munculnya politik identitas di Indonesia ini diakibatkan oleh adanya teritorialisasi identitas dengan adanya pembentukan daerah administratif di beberapa wilayah.[6]

Politik identitas juga dipahami sebagai suatu mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya disembunyikan, ditekan atau diabaikan, baik oleh kelompok dominan atau suatu kepentingan yang mengatasnamakan demokrasi.[7] Tak jarang kemudian latar belakang menjadi salah satu alasan penentu posisi seseorang dalam dunia politik. Keadaan ini

[5] Richard Parker, "Five Theses On Identity Politics", Harvard Journal of Law & Public Policy Vol. 29, No. 01, 2005, 55.
[6] Purwanto, "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif", Jurnal Review Politik Vol. 05, No. 01, Juni 2015. 61-62.
[7] Ibid, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian memunculkan suatu hal yang dinamakan sebagai gerakan politik identitas.

Gerakan ini memiliki beberapa tahap seperti yang diutarakan oleh Klaus Von Beyme. Tahap ini dimulai dari Pra-modern. Dalam tahap ini digambarkan bahwa gerakan politik mengalami perpecahan fundamental dan semua kelompok berpengaruh memunculkan gerakan politik yang menyeluruh. Para pemimpinnya dianggap sebagai seseorang yang menjadi mobilitator secara ideologis.

Tahap selanjutnya yaitu tahap Modern yang dimulai dengan munculnya pendekatan kondisional untuk memobilisasi pihak yang terpecah oleh gerakan pra-modern. Dalam tahap ini mulai muncul keseimbangan dan peran pemimpin-pemimpin dalam gerakan pra-modern tidak terlalu dominan seperti sebelumnya.

Tahap ketiga yaitu Post modern. Dalam tahap ini gerakan-gerakan yang muncul merupakan hasil dari dinamika gerakan itu sendiri. Protes muncul karena adanya berbagai kesempatan yang didapatkan oleh individu-individu karena tidak adanya kelompok yang dominan yang mampu menampung aspirasi mereka.[8]

[8] Ubed Abdillah, Politik Identitas Etnis :Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, (Magelang: Transmedia Pustaka, 2002), 17-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Etnisitas

Indonesia merupakan negara dengan jumlah etnis yang begitu beragam. Dari berbagai macam etnis ini kemudian muncul sikap keberagaman atau pluralitas diantara masyarakat Indonesia. Keberagaman etnis ini seharusnya membawa semangat kesatuan bagi masyarakat. Namun tak jarang isu etnis ini malah menjadi suatu hal yang mampu memecah-belah persatuan.

Masalah yang berhubungan dengan etnis ini paling banyak ditemui dalam hal yang berhubungan dengan politik. Bahkan masalah ini mampu dan pasti akan kita temukan dalam setiap pemilihan politik. Mulai dari tingkat pemilihan kepala desa sampai pada tingkat presiden. Sikap masyarakat Indonesia yang terlalu sensitif dianggap mampu membuat isu ini menjadi mudah untuk disajikan dalam setiap kegiatan politik.

Kalimat etnis memiliki makna yang berarti sebuah sistem atau kelompok sosial ysng mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.[9]

Etnisitas sendiri dipahami sebagai sekelompok manusia yang memiliki ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama.[10] Thomas Sowell menyatakan bahwa etnis merupakan sekelompok orang yang mempunyai praktik dan pandangan hidup yang sama

[9] kbbi.web.id/etnis, (diakses pada 20 Maret pukul 21.46)
[10] H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas nilai dan norma.[11] Etnisitas dapat berwujud sebagai identitas suatu kelompok.[12]

Dalam istilah politik, etnisitas dipahami sebagai sebagai hal yang berkaitan dengan nasionalisme. Dalam penjelasan lebih lanjut, etnisitas ini menyangkut gagasan tentang pembedaan, dikotomi, dan menjadi pembeda terhadap asal-usul dan karakteristik budaya. Kehidupan politik sangat dipengaruhi oleh etnisitas dan etnisitas dapat memengaruhi kehidupan politik.[13]

Etnis dan identitas memiliki makna yang hampir sama. Namun etnisitas ini lebih bersifat universal atau memiliki makna yang luas. Identitas dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang bersifat harfiah. Sedangkan etnisitas merupakan kumpulan dari orang yang memiliki ciri identitas yang sama.

Ada tiga pendekatan yang menjelaskan mengenai etnisitas, yaitu:[14]

a. Pendekatan Primordialisme. Pendekatan ini menyatakan bahwa etnisitas terbentuk karena adanya ikatan sosial. Pendekatan ini erat kaitannya dengan agama, bahasa, adat istiadat dan lainnya.

---

[11] Alo Liliweri, *Prasangka&Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yokyakarta: LKiS, 2005), 9.
[12] H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), xxv.
[13] Fikri Adrian, Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012), 20
[14]H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendekatan Instrumentalisme. Pendekatan ini menganggap bahwa etnisitas adalah sumber budaya politik dan sosial dari berbagai kelompok yang berkepentingan di dalam masyarakat.

c. Pendekatan Transaksional, merupakan pendekatan yang menengahi antara pandangan psikologi Horowitz yang menekankan pada stereotip kelompok dan pandangan etno simbolisme Anthony Smith yang menyatakan bahwa etnisitas terbentuk karena adanya arti masa lalu dari kelompok enis tertentu yang membentuk komunitas kebudayaan.. Pendekatan Transaksional ini menyatakan bahwa kelompok etnis merupakan suatu unit yang ditentukan batas-batas sosialnya. Tidak hanya sebatas bahasa, cara berpakaian dan sebagainya.

C. Sejarah Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia

Etnis Tionghoa diketahui telah lama tinggal di Indonesia. Jejak pertama kaum Tionghoa di Indonesia dimulai sejak masa Dinasti Han (206 SM – 220 SM). Mereka datang dengan tujuan berdagang, menyebarkan agama Buddha dan ilmu pengetahuan lainnya. Jumlah mereka semakin bertambah banyak semenjak Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke nusantara.[15]

[15] Kong Yuanzhi, *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005), 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah politik etnis Tionghoa di Indonesia dimulai sejak jaman kolonial Belanda. Pada masa itu banyak pendatang non pribumi yang telah menetap di Indonesia. Belanda melakukan politik separatisme antar golongan. Etnis Tionghoa sendiri menempati posisi sebagai warga kelas dua bersama dengan orang India, Arab dan orang timur lainnya.[16] Meski menempati posisi sebagai warga kelas dua, etnis Tionghoa tetap mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah Belanda. Warga Tionghoa yang ingin melakukan perjalanan juga harus meminta ijin *passenstelsel* (pas jalan) kepada pemerintah Belanda.[17]

Karena adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut, warga Tionghoa mulai membentuk *Tiong Hoa Hwee Koan* atau perkumpulan Tionghoa di Jakarta. Perkumpulan ini berisi orang-orang Tionghoa yang berpendidikan Barat. Gerakan ini menuntut adanya persamaan hak antar orang Tionghoa dengan Belanda. Dari gerakan ini kemudian muncul sekolah-sekolah untuk warga etnis Tionghoa yang khusus mendidik siswanya dengan nasionalisme Cina. Mereka juga membuat surat kabar Sin Po yang berbahasa tionghoa dan brisi tentang nasionalisme Tionghoa.[18]

Setelah munculnya THHK, muncul pula organisasi politik *Chung Hwa Hui* pada tahun 1928. Organisasi politik ini aktif dalam kegiatan

---

[16] Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Insani, 2000), 150-151.
[17] *Ibid*, 152-153.
[18] Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia* 1900-2002, (Jakarta: LP3ES, 2002), 272-273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik lokal. Bahkan mereka juga aktif dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat). Organisasi ini juga berpartisipasi dalam gerakan Sumpah Pemuda, meski mereka tidak andil langsung didalamnya. Mulai tahun 1930 gerakan politik etnis Tionghoa mulai terasa. Banyak dari mereka yang melakukan gerakan-gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Jepang. [19]

Di tengah-tengah terpecahnya pandangan politik etnis Tionghoa, tahun 1932 Liem Koen Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia di Surabaya. Visi partai ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna BPKI tanggal 11 Juli 1945, Liem Koen Hian mendesak agar BPKI mendeklarasikan bahwa Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia dalam UUD 1945.[20]

Tahun 1945 empat orang yang berasal dari etnis Tionghoa ikut dalam merancang UUD RI dan menjadi anggota BPUPKI. Keempatnya yaitu Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Mr. Tan Eng Hua dan Liem Koen Hian. Sedangkan seorang lagi menjadi anggota dalam PPKI yang bernama Jap Twan Bing.[21]

Setelah Indonesia merdeka tercatat beberapa orang yang berasal dari Etnis Tionghoa turut menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Tan

---

[19] Ibid, 49.
[20] La Ode, Etnis *Cina Indonesia dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), 128-129.
[21] Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: LP3ES, 2002), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Po Gwan, Siaw Giok Tjhan, Ong Eng Die adalah bebebrapa nama menteri non pribumi yang pernah menduduki jabatan penting dalam kabinet. Bahkan etnis Tionghoa juga tercatat andil dalam Perjanjian Renville dan KMB.[22]

Pada awal abad 20 posisi kaum Tionghoa dalam politik dan pergerakan nasional kembali mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pergerakan-pergerakan nasional yang menutup diri dari kaum yang bukan pribumi. Beberapa organisasi-organisasi politik tersebut diantaranya PNI, Partindo, PNI Baru dan Parindra. Bahkan Sarekat Islam juga menolak kaum Tionghoa untuk menjadi bagian dari aktivitasnya.[23]

Pada masa orde lama setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai partai politik mulai terbuka dengan kehadiran kaum tionghoa sebagai anggotanya. Hal ini dilakukan untuk merebut dukungan dari etnis Tionghoa demi tercapainya tujuan para nasionalis. Persatuan Tionghoa berubah nama menjadi Partai Demokrat Tionghoa yang memiliki orientasi ke Indonesia dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI).[24]

Pada masa orde baru keadaan kaum Tionghoa di Indonesia semakin terancam. Mereka selalu dijadikan alasan dibalik peristiwa kudeta Soekarno dan gerakan G30SPKI. Mereka dianggap sebagai kaum komunis karena pada saat kepemimpinan Soekarno, beliau memiliki orientasi

[22] La Ode, *Etnis Cina Indonesia dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), 131-132.
[23] Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), 6-7.
[24] Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, (Jakarta: LP3ES, 2002), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekirian yang cenderung komunis.[25] pada era ini, pergerakan kaum Tionghoa dalam bidang politik semakin dibatasi.

Pemerintah orde baru juga menerapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan asimilasi. Kebijakan ini memaksa kaum Tionghoa untuk tidak mengeksklusifkan kelompok mereka. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menghapus tiga pilar utama budaya Tionghoa yaitu, sekolah, organisasi, dan media Tionghoa. Kelompok tionghoa pun mulai membaur dengan ikut bergabung kedalam partai politik seperti Golkar. Aspirasi politik Tionghoa pun lebih banyak pada urusan kebijakan ekonomi dan bisnis.[26]

Setelah melewati masa-masa orde baru yang mencekam, pada era reformasi etnis Tionghoa mulai kembali bernafas lega. Di era ini mereka mulai kembali merasakan kebebasan. Tidak ada lagi larangan bagi mereka dalam melakukan kegiatan kebudayaan maupun kegiatan sosial politik mereka. Era ini ditandai dengan munculnya sejumlah partai yang bernuansa Tionghoa seperti Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), dan Partai Bhinneka Tunggal Ika.

[25] *Ibid*, 144.
[26] Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia

Etnis Tionghoa diketahui telah lama tinggal di Indonesia. Jejak pertama kaum Tionghoa di Indonesia dimulai sejak masa Dinasti Han (206 SM – 220 SM). Mereka datang dengan tujuan berdagang, menyebarkan agama Buddha dan ilmu pengetahuan lainnya. Jumlah mereka semakin bertambah banyak semenjak Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke nusantara.[1]

Pada mulanya para pelayar ini hanya menetap untuk sementara waktu saja untuk berdagang. Lamban laun mereka mulai tertarik untuk menetap di Indonesia karena kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Selain itu, penerimaan masyarakat sekitar akan kedatangan merekapun dianggap sebagai suatu kekaguman tersendiri. Banyak dari mereka yang kemudian menikah dengan warga pribumi. Dan tak jarang mereka juga menikahi pribumi dari kalangan kerajaan, salah satunya yaitu kerajaan Majapahit.

[1] Kong Yuanzhi, *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005), 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran Tionghoa dalam kerajaan Majapahit juga dianggap besar, hal ini dikarenakan keberadaan mereka menjadi ujung tanduk perkembangan ekonomi Majapahit pada masa itu.[2]

Etnis Tionghoa sendiri memiliki banyak peran yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia mulai dari agama, kesenian, sastra dan sebagainya. Namun tidak ada catatan secara lengkap mengenai hal tersebut. Malahan catatan menenai etnis Tionghoa yang digambarkan sebagai binatang ekonomi (economic animal) yang banyak disinggung.[3] Sehingga banyak menimbulkan kesalah pahaman yang sampai saat ini masih bisa dirasakan. Bahkan hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kelompok kepentingan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

B. Sejarah Politik Etnis Tionghoa di Indonesia

Sejarah politik etnis Tionghoa di Indonesia dimulai sejak jaman kolonial Belanda. Pada masa itu banyak pendatang non pribumi yang telah menetap di Indonesia. Belanda melakukan politik separatisme antar golongan. Etnis Tionghoa sendiri menempati posisi sebagai warga kelas dua bersama dengan orang India, Arab dan orang timur lainnya.[4] Meski menempati posisi sebagai warga kelas dua, etnis Tionghoa tetap mendapatkan perlakuan tidak

---

[2] Adrian Perkasa, Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit, (Yogyakarta: Penerbit Ombah, 2012), 47.
[3] Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 6.
[4] Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Insani, 2000), 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil dari pemerintah Belanda. Warga Tionghoa yang ingin melakukan perjalanan juga harus meminta ijin *passenstelsel* (pas jalan) kepada pemerintah Belanda.[5]

Karena adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut, warga Tionghoa mulai membentuk *Tiong Hoa Hwee Koan* atau perkumpulan Tionghoa di Jakarta. Perkumpulan ini berisi orang-orang Tionghoa yang berpendidikan Barat. Gerakan ini menuntut adanya persamaan hak antar orang Tionghoa dengan Belanda. Dari gerakan ini kemudian muncul sekolah-sekolah untuk warga etnis Tionghoa yang khusus mendidik siswanya dengan nasionalisme Cina. Mereka juga membuat surat kabar Sin Po yang berbahasa tionghoa dan brisi tentang nasionalisme Tionghoa.[6]

Setelah munculnya THHK, muncul pula organisasi politik *Chung Hwa Hui* pada tahun 1928. Organisasi politik ini aktif dalam kegiatan politik lokal. Bahkan mereka juga aktif dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat). Organisasi ini juga berpartisipasi dalam gerakan Sumpah Pemuda, meski mereka tidak andil langsung didalamnya.

Dalam bidang politik dan bela negara, etnis Tionghoa banyak ikut serta di dalamnya. Pada saat sumpah pemuda, golongan Tionghoa ikut memfasilitasi dengan cara memberikan gedung Sumpah Pemuda oleh Sie Kong Liong. Beberapa dari mereka juga ikut dalam sumpah pemuda, antara lain, Kwee Tiam Hong dan tiga pemuda Tionghoa lainnya.

---

[5] *Ibid*, 152-153.
[6] Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia* 1900-2002, (Jakarta: LP3ES, 2002), 272-273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum Tionghoa juga gencar memberikan pemberitaan dan informasi yang bersifat nasionalis. Surat kabar Sin Po adalah media yang paling gencar memberitakan hal-hal tersebut. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pertama kali dipublikasikan oleh Koran Sin Po dan banyak lagi hal-hal yang berbau nasionalisme yang diberitakan oleh koran Sin Po. Hal ini kemudian menjadi pelopor harian lainnya. Sehingga muncul kata Tionghoa untuk mengganti kata "Tjina" yang dilakukan oleh media lokal sebagai bentuk balas budi.

Mulai tahun 1930 gerakan politik etnis Tionghoa mulai terasa. Banyak dari mereka yang melakukan gerakan-gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Jepang. [7]

Di tengah-tengah terpecahnya pandangan politik etnis Tionghoa, tahun 1932 Liem Koen Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia di Surabaya. Visi partai ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna BPKI tanggal 11 Juli 1945, Liem Koen Hian mendesak agar BPKI mendeklarasikan bahwa Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia dalam UUD 1945.[8]

Tahun 1945 empat orang yang berasal dari etnis Tionghoa ikut dalam merancang UUD RI dan menjadi anggota BPUPKI. Keempatnya yaitu Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Mr. Tan Eng Hua dan Liem Koen Hian.

---

[7] Ibid, 49.
[8] La Ode, Etnis *Cina Indonesia dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan seorang lagi menjadi anggota dalam PPKI yang bernama Jap Twan Bing.[9] Dalam perjuangan fisik sebenarnya banyak pahlawan dari Tionghoa yang terjun namun sayangnya tidak banyak dicatat dan diberitakan. Tony Wen adalah orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya.

Setelah Indonesia merdeka tercatat beberapa orang yang berasal dari Etnis Tionghoa turut menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Tan Po Gwan, Siaw Giok Tjhan, Ong Eng Die adalah bebebrapa nama menteri non pribumi yang pernah menduduki jabatan penting dalam kabinet. Bahkan etnis Tionghoa juga tercatat andil dalam Perjanjian Renville dan KMB.[10]

Pada awal abad 20 posisi kaum Tionghoa dalam politik dan pergerakan nasional kembali mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pergerakan-pergerakan nasional yang menutup diri dari kaum yang bukan pribumi. Beberapa organisasi-organisasi politik tersebut diantaranya PNI, Partindo, PNI Baru dan Parindra. Bahkan Sarekat Islam juga menolak kaum Tionghoa untuk menjadi bagian dari aktivitasnya.[11]

Pada masa orde lama setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai partai politik mulai terbuka dengan kehadiran kaum tionghoa sebagai anggotanya. Hal ini dilakukan untuk merebut dukungan dari etnis Tionghoa demi tercapainya tujuan para nasionalis. Persatuan Tionghoa berubah nama menjadi

---

[9] Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: LP3ES, 2002), 383.
[10] La Ode, *Etnis Cina Indonesia dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), 131-132.
[11] Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Demokrat Tionghoa yang memiliki orientasi ke Indonesia dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI).[12]

Pada masa orde baru keadaan kaum Tionghoa di Indonesia semakin terancam. Mereka selalu dijadikan alasan dibalik peristiwa kudeta Soekarno dan gerakan G30SPKI. Mereka dianggap sebagai kaum komunis karena pada saat kepemimpinan Soekarno, beliau memiliki orientasi kekirian yang cenderung komunis.[13] pada era ini, pergerakan kaum Tionghoa dalam bidang politik semakin dibatasi.

Pemerintah orde baru juga menerapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan asimilasi. Kebijakan ini memaksa kaum Tionghoa untuk tidak mengeksklusifkan kelompok mereka. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menghapus tiga pilar utama budaya Tionghoa yaitu, sekolah, organisasi, dan media Tionghoa. Kelompok tionghoa pun mulai membaur dengan ikut bergabung kedalam partai politik seperti Golkar. Aspirasi politik Tionghoa pun lebih banyak pada urusan kebijakan ekonomi dan bisnis.[14]

Setelah melewati masa-masa orde baru yang mencekam, pada era reformasi etnis Tionghoa mulai kembali bernafas lega. Di era ini mereka mulai kembali merasakan kebebasan. Tidak ada lagi larangan bagi mereka dalam melakukan kegiatan kebudayaan maupun kegiatan sosial politik mereka. Era ini ditandai dengan munculnya sejumlah partai yang bernuansa Tionghoa

---

[12] Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, (Jakarta: LP3ES, 2002), 26.
[13] *Ibid*, 144.
[14] Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), dan Partai Bhinneka Tunggal Ika.

C. Politik Etnis Tionghoa

Dalam perjalanan politiknya etnis Tionghoa harus mengahadapi berbagai macam tantangan yang tidak mudah. Berbagai macam bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan harus dihadapi. Tahun 1965 dan 1998 menjadi tahun periode kegelapan bagi etnis Tionghoa. Khususnya pada tahun 1998. Sampai saat ini dua kejadian tersebut masih menjadi alasan trauma berpolitik bagi etnis Tionghoa.

Pada orde baru, etnis Tionghoa sama sekali tidak memiliki representasi di bidang politik. Hanya beberapa kalangan saja yang termasuk dalam kalangan atas dan cukonglah yang mampu merasakan keadilan politik pada masa itu. Hal ini disebabkan karena monopoli yang dilakukan Suharto yang membuat mereka kebal akan hukum dan lain sebagainya.[15]

Warga Tionghoa baru merasakan kebebasan berpolitik sejak runtuhnya rezim Suharto pada tahun 1998. Meski sebelumnya mereka harus menghadapi pemberontakan dan kekerasan, mereka perlahan bangkit dari keterpurukan. Bahasa Cina mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Berbagai kesenian Cina juga

[15] Sarah Turner, *Speaking Out: Chinese Indonesian After Suharto*, Asian Ethnicity Vol. 04 No. 03. 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dengan mudah dipertontinkan. Bhakan tahun baru Cina juga menjadi hari libur nasional.[16]

Meski sebelumnya mereka memiliki Partai Tionghoa Indonesia dan berbagai kelompok yang bergerak dib dang politik, namun karena berbagai hambatan yang ada, berbagai kegiatan tersebut terhenti. Meskipun dimikian, perjuangan mereka lakukan dengan cara diam-diam.

Sampai pada akhirnya setelah reformasi, muncul berbagai macam perkumpulan Tionghoa seperti INTI dan PSMTI. Tidak hanya bergerak dalam bidang politik saja, mereka juga bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Kemudian bebebrapa kalangan membentuk Partai Reformasi Tionghoa Indonesia meskipun mereka tidak ikut serta dalam pemilu tahun 1999.

Seorang pakar ekonomi yang berasal dari etnis Tionghoa, Dr. thee Kian Wie menyatakan bahwa trend akan politik representasi di kalangan Tionghoa sangatlah baik, namun mereka sebaiknya tidak membentuk partai atau hanya berkumpul dengan sesama kalangannya sendiri. Karena pada saat satu ras berkumpul, maka di dalamnya kita hanya akan memikirkan tentang ras kita sendiri. Beliau sangat menolak keberadaan partai dengan latar belakang etnik yang sama. Etnis Tionghoa lebih baik bergabung dengan partai-partai yang telah ada seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, atau Partai Amanat Nasional. Hal ini dianggap karena beberapa partai

[16] Charlotte Setijadi, *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia : Changing Identity Politics and The Paradox of Sinification*, Perspective No. 12, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut lebih memiliki latar belakang kepartaian yang tidak memihak kepada etnis atau agama.[17]

Lamban laun jumlah warga Tionghoa yang terdaftar sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum juga meningkat. Tercatat terdapat 100 orang kandidat dari etnis Tionghoa pada pemilun tahun 2004. 213 kandidat pada pemilu tahun 2009 dan 315 kandidat pada pemilu tahun 2014.[18]

1. Kebangkitan Politik Etnis Tionghoa di Surabaya

Etnis Tionghoa diketahui mulai menapakkan kaki di Surabaya pada abad 14. Hal ini dibuktikan dengan adanya sumber berupa penemuan kampung Tionghoa Islam di kawasan Muara Sungai Brantas Kiri (Porong). Seluruhnya bekerja sebagai pedagang. Jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya. Jumlahnya bahkan melebihi jumlah imigran lainnya yang ada di Surabaya. Data tahun 1920 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Tionghoa di Indonesia mencapai 18.020 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat etnis Arab yang berjumlah 2.359 dan etnis Asia lainnya berjumlah 165 orang.[19]

Pada masa-masa awal kedatangan etnis Tionghoa di Surabaya, perilaku politik mereka belum terlalu jelas terlihat. Fokus utama mereka adalah berdagang dan menjadi tenaga kerja. Karena tidak semua etnis Tionghoa pada saat itu merupakan pengusaha. Baru pada awal abad 20, etnis

---

[17] Sarah Turner, *Speaking Out: Chinese Indonesian After Suharto*, Asian Ethnicity Vol. 04 No. 03, 349

[18] http://aasiapasific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/04/striving-for-safety/

[19] Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, (Semarang: Mesiass, 2004), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tionghoa mulai menunjukkan ketertarikannya dalam bidang politik. Bahkan pendatang yang awalnya memiliki misi untuk berdagang, mulai membawa misi-misi politik.

Banyak dari mereka yang mulai tergerak untuk terjun kedalam politik karena adanya pergolakan politik dan peperangan di Tiongkok. Selain itu, munculnya pergolakan politik yang berhubungan dengan nasionalisme di Indonesia juga menjadi alasan munculnya kelompok-kelompok Tionghoa bernuansa politik.[20]

2. Masa awal-akhir Kolonialisme Belanda

Pada awal kolonialisme Belanda, posisi Tionghoa di Surabaya mayoritas adalah masih sebagai pedagang. Kegiatan yang berhubungan dengan politik masih belum terlalu terasa di masa ini. Peran utama etnis Tionghoa pada masa ini adalah pada sektor usaha dan perdagangan. Bahkan mereka juga memiliki peran penting dalam kemajuan sektor perdagangan dan industri di Surabaya.

Meskipun mulai muncul bibit-bibit diskriminasi dan adu domba oleh pihak Belanda, etnis Tionghoa masih tetap beraktivitas seperti sebelumnya. Meski mereka harus menerima adanya pengkotak-kotakan masyarakat yang menyebabkan mereka harus tinggal terpisah dengan pribumi dan etnis lainnya. Tidak ada pilihan lain karena peraturan yang dibuat Belanda pada saat itu bersifat mutlak.[21]

---

[20] *Ibid*, 2-3
[21] *Ibid*, 7-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian muncul istilah politik pecinan yag dimunculkan oleh Belanda. Politik pecinan ini ditujukan untuk memonopoli etnis Tonghoa. Selain itu politik pecinan ini juga digunakan Belanda untuk mengadu domba Tionghoa dengan pribumi.

Politik pecinan ini kemudian menimbulkan adanya perasaan solidaritas diantara para pendatang. Kemudian mereka mulai membentuk organisasi-organisasi bernuasa ekonomi dan politik yang terpisah dengan orang Indonesia, Belanda atau Barat lainnya. Jadi mereka benar-benar membentuk organisasi yang berisikan Tionghoa. Organisasi-organisasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai alat perjuangan menghadapi kolonialisme Belanda.[22]

Di Surabaya sendiri ada tiga organisasi besar Tionghoa, yaitu Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK) yaitu perserikatan orang-orang Tionghoa yang berdiri pada tahun 1900. Yang kedua adalah Siang Hwee atau kamar dagang Tionghoa yang berdiri pada tahun 1907. Yang terakhir adalah Chung Hua Hui. THHK bergerak dalam bidang politik, sosial dan pendidikan. Sedangkan Siang Hwee yang awalnya mengurusi masalah ekonomi dan perdagangan mulai masuk kedalam masalah etnik dan pendidikan.[23]

Pada dasawarsa ke-2 dan ke-3 abad 20, perkembangan orientasi politik dan budaya sangat berguna untuk melihat kondisi pendidikan Tionghoa pada masa itu. Namun di sisi lain, banyak etnis Tionghoa yang terpecah belah

[22] *Ibid*, 50-52
[23] *Ibid*, 51-52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena orientasi politik dan budaya. Ada sebagian yang masih memegang teguh tradisi sebagai Tionghoa. Namun ada juga yang memilih untuk berasimilasi dengan budaya setempat.

Gerakan nasionalisme THHK di Surabaya bergerak aktif melalui surat kabar Pewarta Soerabaia. Melalui pewarta tersebut mereka mengritik pemerintahan Belanda dan ikut menyuarakan nasionalisme. Golongan nasionalis ini dekat dengan golongan Sin Po yang berkembang di Batavia. Gerakan ini kental akan tradisi Tionghoa yang kuat. Meskipun di sisi lain mereka juga menyuarakan tentang nasionalisme Indonesia. Gerakan tersebut juga merupakan ekspresi ketidakpuasan penduduk Tionghoa yang ingin menghapuskan diskriminasi politik Belanda terhadap Tionghoa. Mereka berhasil mencapai cita-citanya setelah Belanda mengikutsertakan salah satu Tokohnya, Liem Koen Hian, dalam dewan Volksraad & Indie Weerbaar.

Organisasi Chung Hwa Hui merupakan organisasi politik yang selalu loyal terhadap keputusan pemerintah Belanda. hal ini mereka lakukan untuk menyelamatkan posisi Tionghoa dalam politik. Sehingga mereka selalu mendapat jumlah kursi terbanyak perwakilan untuk peranakan Tionghoa dalam Dewan Kotapraja Surabaya. Meski pada tahun 1931 dominasinya dikalahkan oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

Kemudian muncul Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang berdiri di Surabaya pada 25 September 1932. Partai ini memiliki sikap nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia dan menganggap bahwa Indonesia merupakan tanah air satu-satunya yang dimiliki. Meski demikian partai ini hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima peranakan sebagai anggota biasa. Sedangkan yang bukan peranakan hanya bisa menjadi anggota luar biasa dan tidak memiliki hak suara. Kelompok ini sepenuhnya mendukung perjuangan Indonesia dan mereka mempunyai hubungan dengan para pemimpin Indonesia termasuk diantaranya yaitu Dr. Soetomo.[24]

3. Berakhirnya Kolonialisme Belanda dan Awal Kolonialisme Jepang

Setelah runtuhnya kekuasaan Belanda, kekuasaan beralih jatuh ke tangan Jepang banyak muncul kebijakan yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan Belanda. pada masa ini juga muncul organisasi Tionghoa buatan Jepang dengan tujuan untuk mengadu domba yang bernama HCCH. Namun organisasi ini tak bertahan lama dan organisasi-organisasi lama mulai kembali bermunculan dengan nama baru, diantaranya Chung Hwa Tsung Hui (CHTH).[25]

Dalam era ini organisasi politik Tionghoa tidak terlalu mengalami gejolak seperti saat masa pemerintahan kolonial Belanda. banyak dari mereka yang kembali fokus dalam bidang perdagangan dan industri. Hal ini dikarenakan banyak kebijakan Jepang yang masih mengadaptasi kebijakan Belanda sebelumnya.

Namun sejak bergolaknya perang dunia ke II yang mengakibatkan pada kekalahan Jepang atas Sekutu, organisasi-organisasi Tionghoa ini juga mulai aktif kembali dalam bidang politik bersama dengan organisasi-

[24] *Ibid*, 78-79
[25] *Ibid*, 89-90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi nasionalis lainnya. Momentum ini digunakan sebagai jalan untuk melebarkan sayap dalam bidang politik setelah sekian lama mendapatkan diskriminasi politik.

Beberapa tokoh Tionghoa ikut tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam rapatnya terdapat pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang negara Indonesia dan status kewarganegaraan. Dalam era ini, sebenarnya etnis Tionghoa masih dianggap sebagai orang asing oleh kaum pribumi. Mereka dihadapkan pada pilihan untuk menjadi orang Indonesia atau tidak sama sekali. sedangkan banyak diantara mereka yang tidak siap meninggalkan *kecinaan* mereka dan banyak pula yang merasa bahwa mereka bukan orang Indonesia.[26]

4. Masa Proklamasi Indonesia

Pada masa-masa terakhir pemerintahan Jepang di Indonesia, etnis Tionghoa banyak berperan dalam proses demi proses. Bahkan beberapa dari mereka tergabung dalam Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun gejolak kembali muncul karena adanya pengumuman pemerintah daerah Republik Indonesia Surabaya mengenai orang Tionghoa sebagai orang asing. Pengumuman itu berisi perintah kepada para etnis Tionghoa untuk segera mendaftarkan diri sebagai orang Eropa atau orang Indonesia.

Dalam era ini banyak organisasi politik Tionghoa yang mulai membentuk sayap-sayap baru organisasi yang berbeda dengan organisasi Tionghoa sebelumnya. Hal ini menyebabkan munculnya perpecahan di dalam

[26] *Ibid*, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etnis Tionghoa tersebut. Ada yang menganggap bahwa pemerintahan Indonesia tidak akan pernah terwujud, mereka kemudian berubah menjadi anti-Republik. Bahkan pada bentrokan Oktober-November 1945 di Surabaya, organisasi-organisasi anti-Republik ini berpihak kepada Belanda. Pasukan pejuang Surabaya, PTKR adalah pasukan yang ditugaskan untuk membersihkan orang-orang Tionghoa yang dianggap sebagai mata-mata Belanda. Setelah itu muncul berbagai serangan-serangan terhadap orang-orang asing termasuk Tionghoa di Surabaya.

Atas munculnya serangan-serangan tersebut, PRI (Partai Republik Indonesia) bersama pemuda Tionghoa turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai macam usaha-usaha kerjasama antara Tionghoa dengan pribumi Surabaya mulai dibangun. Selain mendirikan tempat-tempat pelayanan umum, mereka juga membentuk Partai Keamanan Rakyat (PKR) pada 21 November 1945 dengan tujuan menjaga keamanan dan mengurus warga Tionghoa dan warga pribumi Surabaya.

PKR telah menyepakati bahwa mereka tidak mau tergabung dalam segala macam urusan politik. PKR dibentuk untuk menyelamatkan warga Surabaya yang tidak mengungsi akibat pertempuran Surabaya dengan Sekutu. Dalam perjuangannya, banyak orang Tionghoa yang gugur di dalamnya.[27]

5. Masa Orde Lama-Orde Baru

Masa orde lama merupakan masa kebangkitan bagi kaum Tionghoa. Pada masa itu tercipta pula hubungan politik poros Jakarta-Peking. Presiden

[27] *Ibid*, 90-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RI pada saat itu, Bung Karno, memiliki hubungan dekat dengan PKI dan Negara Tiongkok. Bahkan beliau menganggap bahwa Tiongkok merupakan satu dari lima negara berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia.[28]

Hal ini juga berimbas pada posisi politik etnis Tionghoa di Surabaya. Mereka tidak takut lagi akan acaman-ancaman pemberantasan warga asing dan sebagainya. Bahkan mereka bisa lebih leluasa beraktivitas dalam bidang perdagangan karena mudahnya akses ke negara asalnya, Tiongkok. Namun karena posisi politik dan negara yang belum stabil saat itu, saat Indonesia, khususnya Surabaya membutuhkan bantuan militer dan lainnya, etnis Tionghoa juga selalu siap sedia untuk membantu. Kehidupan antara etnis Tionghoa, pribumi dan etnis lainnya berjalan secara beriringan dan harmonis pada masa ini.

Lepas dari Orde Lama, etnis Tionghoa kembali mendapatkan tindakan diskriminasi baik secara fisik maupun politis. Masa ini begitu kental dengan anggapan bahwa orang Tionghoa sama dengan PKI. Kejadian ini dimulai pada tahun 1965. Semenjak itu muncul banyak peraturan-peraturan yang berbau diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 yang bersi tentang larangan tentang segala hal yang berbau Cina. Hal ini dilakukan karena pemerintahan masa itu masih menganggap bahwa etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia masih memiliki

[28] J. Babari dan Albertus Sugeng, *Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Gandi, 1999), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan yang kuat dengan negara leluhurnya yaitu Tiongkok sehingga nasionalisme mereka dipertanyakan.[29]

Orde baru benar-benar membatasi gerak dan ekpresi etnis Tionghoa. Baik secara sosial maupun politik. Mereka kembali dianggap mejadi orang asing pada masa ini. Segala macam kegiatan Tionghoa terus diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi asalah Cina (BMKC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelejen (Bakin).

6. Masa Reformasi-Sekarang

Reformasi bisa dikatakan sebagai tahun kebangkitan etnis Tionghoa. Setelah runtuhnya rezim Suharto, mereka mulai berani menunjukkan diri di kancah politik. Meski jumlahnya tidak banyak, namun kehadiran mereka dalam dunia politik membawa suasana baru bagi sistem politik di Indonesia. setelah sebelumnya politik hanya dikuasai oleh kalangan pribumi, etnis Tionghoa pada akhirnya ikut andil di dalamnya.

Sebelumnya etnis Tionghoa dipandang sebagai kaum pebisnis yang memiliki individualitas yang tinggi. Maka tak jarang kehadiran mereka dalam dunia politik dianggap sebagai suatu jalan bagi mereka untuk mnyelamatkan aset dan memperkaya diri sendiri. Padahal banyak dari mereka yang memang memiliki cita-cita untuk membangun Indonesia dan mendapatkan kesetaraan.

Tidak hanya pada masa lalu, diskriminasi pada etnis Tionghoa masih dirasakan sampai saat ini. Bisa dikatakan warisan masa lalu mengenai

[29] Muhammad Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Pendemokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebencian terhadap kaum yang dianggap sebagai penjajah modern itu masih melekat di benak banyak masyarakat Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Warisan ketakutan dan trauma berpolitik yang dimiliki oleh warga Tionghoa juga tidak begitu saja dilepaskan.

Tahun 2012 bisa dikatakan sebagai tahun awal kebangkitan besar bagi etnis Tionghoa dalam dunia politik. Setelah kemunculan sosok Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering dipanggil Ahok dalam pemilukada DKI Jakarta. Sosok fenomenal yang dikenal dengan gaya khasnya ini berhasil menduduki jabatan sebagai wakil gubernur yang kemudian diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2014. Semenjak itu banyak bermunculan aktor politik yang berasal dari kalangan Tionghoa. Mereka secara terang-terangan menggunakan identitas yang selama ini disembunyikan karena alasan politik masa lalu.

Meski demikian, arus kemajuan politik Tionghoa di Indonesia mulai meningkat semenjak gerakan reformasi. Tionghoa dan Cina menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari politik Indonesia. Banyak kebijakan yang dibuat untuk masyarakat yang menggunakan pinjaman yang berasal dari Cina. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Tionghoa yang ada di Indonesia. pada tahun 2015 sendiri Indonesia memiliki defisit sebesar US$10 miliar ke Cina. Meski bukan merupakan hal yang baik, namun hal ini juga banyak membantu sektor pembangunan di Indonesia.[30]

[30] Charlotte Setijadi, *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia : Changing Identity Politics and The Paradox of Sinification*, Perspective No. 12, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Politik Identitas Tionghoa di Surabaya

Surabaya merupakan kota metropolitan di Jawa Timur. Penduduknya di dominasi oleh etnis Jawa dan beberapa etnis pendatang seperti Madura Arab Tionghoa dan lainnya. Etnis tersebut hidup berdampingan sampai saat ini. Meski telah berbaur satu sama lain, tak jarang etnis-etnis tersebut juga hanya mau berkumpul dengan sesama. Bahkan dalam lingkup politik sekalipun.

Etnis tionghoa merupakan etnis mayoritas terbesar ketiga setelah Jawa (83,68%) dan Madura (7,5%). Dengan jumlah prosentasi 7,25% etnis ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari kehidupan kota Surabaya.[31] Kawasan Jalan Kembang Jepun dan kegiatan jual-beli di pasar Atom Surabaya yang tidak pernah sepi ini menjadi saksi bahwa etnis ini merupakan salah satu etnis yang sangat aktif dan produktif. Pada masa lalu, lokasi Kembang Jepun ini memiliki peran penting dalam membangun perekonomian kota Surabaya.

Dalam sejarah pun tercatat bahwa etnis Tionghoa juga ikut berperan dalam perjuangan Surabaya mulai dari sebelum kemerdekaan sampai pada pertempuran 10 Nopember 1945. Banyak dari mereka yang juga aktif dalam dunia politik. Namun di sisi lain mereka jua tetap mempertahankan gaya hidup mereka sebagai pedagang.

Sejak masa reformasi, etnis Tionghoa di Surabaya lebih memilih untuk melanjutkan usaha yang telah mereka bangun. Banyak dari mereka yang tidak

[31] Sudarso, dkk. Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 06 No. 01, Juni 2013, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertarik untuk terjun kedalam dunia politik. Hal ini karena mereka masih merasa takut akan ancaman-ancaman yang terjadi seperti pada kerusuhan 1998. Meskipun ada beberapa yang masih ingin meneruskan perjuangan di bidang politik, mereka terhalang oleh restu orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk terjun dalam dunia politik.

Meski reformasi telah memberikan kebebasan bagi mereka untuk berekspresi dalam segala bidang, banyak etnis Tionghoa, terutama mereka yang memiliki usaha, menjadi target pemerasan dan korupsi oleh para pemegang kekuasaan. Namun di sisi lain juga mereka berperan sebagai aktor dalam sistem politik bisnis yang tidak kalah korupnya. Bagi mereka yang memiliki aset besar akan mudah untuk mengatur agar usaha mereka tetap berjalan atau malah bertambah besar. Namun bagi mereka yang memiliki usaha kecil atau baru bangkit dari keterpurukan akibat adanya konflik 1998 harus menanggung pemerasan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.[32]

Dari politik bisnis itu kemudian muncul preman-preman yang bertugas untuk melindungi pengusaha Tionghoa dari berbagai macam kewajiban mereka baik dalam hal pajak taupun lainnya. Dari hal ini pula muncul pemikiran bahwa etnis Tionghoa yang ingin terjun ke dalam politik adalah mereka yang memiliki keinginan untuk menyelamatkan aset mereka agar

[32] Chong Wu-Ling, *Local Politics and Chinese Indonesian Bussiness in Post-Suharto Era*, Southeast Asian Studies Vol. 04, No.03, 2015, 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas pajak dan sebagainya.[33] Selain itu, banyak dari politisi Tionghoa yang terpilih merupakan pengusaha besar yang telah memiliki aset yang besar.[34]

Meskipun tindak diskriminasi dan kekerasan tidak begitu terasa dalam pergolakan politik di Surabaya, etnis Tionghoa Surabaya tetap merasakan dampak dari diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di kota lain. Hal ini karena tradisi Tiongkok yang monokultural. Mereka sangat menghargai leluhur dan mereka sama-sama merasa memiliki satu sama lain. Sehingga tak jarang banyak kita temui solidaritas antar Tionghoa cukup besar.

Kehadiran etnis Tionghoa dalam jajaran legislatif di Surabaya bukan merupakan hal yang baru. Tercatat beberapa nama berhasil menjabat sebagai wakil rakyat baik dalam tingkat kota maupun tingkat provinsi. Banyak dari mereka yang aktif sebagai pengurus dalam beberapa partai politik.

Kehadiran etnis Tionghoa dalam politik Surabaya telah dirasakan sejak jaman perjuangan melawan penjajah. Surabaya sendiri menjadi basis bagi beberapa perkumpulan politik etnis Tionghoa pada masanya. Meskipun demikian, tak jarang sinisme akan etnis Tionghoa dalam bidang politik juga dirasakan. Meski demikian, semenjak munculnya efek politik yang dibawa oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga menjadi dampak tersendiri bagi kalangan Tionghoa di Surabaya. Tahun demi tahun jumlah pendaftar calon legislatif maupun anggota parpol dari kalangan Tionghoa meningkat.[35]

---

[33] *Ibid*, 500-502.
[34] *Ibid*, 507.
[35] Data Partai Nasdem 2014-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya dalam bentuk partisipasi politik saja, politik identitas di kota Surabaya juga tercermin dari sikap para penduduknya yang masih menganggap solidaritas antar golongan itu lebih penting dibandingkan solidaritas sesama. Namun demikian, politik identitas di kota Surabaya tidak terlalu terasa keras seperti pada kota-kota besar lainnya. Hal ini dikarenakan perjuangan bersama yang dimulai dari masa kolonialisme Belanda masih terus terngiang sampai saat ini. Kemudian rasa solidaritas sebagai *Arek Suroboyo* yang tinggi juga menjadi alasan kenapa politik identitas di Surabaya ini terlihat samar dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.[36]

[36] Catatan Tionghoa di Surabaya oleh pengurus INTI Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada analisis data. Hal ini ditujukan sebagai alat ukur dan telaah data yang diperoleh di lapangan. Di sisi lain, hal ini juga sangat penting untuk menjelaskan dan memastikan temuan-temuan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan temuan-temuan yang menggambarkan bagaimana kondisi politik identitas di Surabaya menurut perspektif politisi etnis Tionghoa. Selain itu peneliti juga mengambil perspektif lain untuk menyeimbangkan data-data yang didapatkan.

A. Politik Identitas

Hal paling utama apabila menyinggung soal politik identitas adalah mengenai etnis dan identias kelompok. Produk warisan masa lalu Indonesia memang memiliki peran penting akan lahirnya istilah ini. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di negara lainnya hal ini juga lumrah dilakukan. Hanya saja yang membedakan dengan Indonesia adalah efek akibat politik identitas yang ditimbulkan dalam masyarakat.

Politik identitas sendiri muncul sebagai salah satu cara suatu kelompok untuk membela kelompoknya dalam suatu posisi politis. Hal ini biasanya muncul karena adanya ketidak adilan yang ditimbulkan oleh para pemegang kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini, banyak pandangan muncul mengenai politik identitas. Ada yang berpendapat bahwa politik identitas merupakan suatu bentuk perjuangan ertnis tertentu dalam politik karena adanya diskriminasi. Ada yang menganggap bahwa politik identitas adalah suatu justifikasi suatu pihak atas pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau malah mengadu domba. Di sisi lain, politik identitas juga dapat dipandang sebagai sebuah kewajaran bersikap dalam setiap pemilihan umum. Hal ini dianggap manusiawi karena setiap orang mempunyai ikatan yang kuat dengan mereka yang memiliki latar belakang yang sama.

Politik identitas dan keterlibatan masyarakat Tionghoa merupakan isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Pada dasarnya keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baru lagi. Bahkan dari awal Indonesia merencanakan kemerdekaan, etnis Tionghoa juga ikut andil di dalamnya.

Pada dasarnya manusia tanpa disadari memiliki insting untuk memilih atau berpihak kepada seseorang yang memiliki latar belakang yang sama dengan mereka. Tidak hanya dalam proses pesta demokrasi atau politik saja. Keterikatan seseorang dengan kelompok masing-masing pasti tetap ada.

Meskipun dikenal dengan negara plural yang tersohor dengan Bhinneka Tunggal Ika nya, Indonesia masih memiliki suatu jarak dimana masyarakatnya masih belum bisa menerima satu sama lain secara baik. Banyak gesekan yang ditimbulkan akibat perbedaan identitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena politik identitas Tionghoa semakin menjadi tren semenjak majunya Basuki Thahaja Purnama atau Ahok dalam pemilukada DKI tahun 2012 lalu mendampingi Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Sosok Ahok semakin banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai macam kebijakan dan gaya kepemimpinannya yang berbeda dari lainnya. Kemudian saat Beliau menjadi Gubernur pengganti Jokowi yang pada saat itu Terpilih sebagai Presiden RI, sosoknya semakin tersohor. Dengan semakin meningkatnya popularitas Ahok dalam dunia politik, membuat banyak masyarakat dari etnis Tionghoa yang mulai berani tampil dalam dunia Politik.

Suasana politik Indonesia kemudian dipenuhi dengan nuansa etnis dan identitas yang diusung oleh calon masing-masing. Meskipun banyak dari responden yang mengaku bahwa mereka memilih calon berdasarkan elektabilitas dan visi-misi yang diusung oleh calon. Faktor X berupa pembawaan identitas tetap berperan di dalamnya. Banyak dari pemilih bahkan tidak mengenali siapa-siapa yang ada di dalam kertas suara saat pemilihan. Hal ini mendorong para pemilih untuk memilih calon yang dirasa memiliki latar belakang sama dengan pemilih. Hal ini bisa didasarkan pada latar belakang agama, identitas atau etnis.

1. Politik Identitas di Surabaya

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Selain dikenal sebagai kota pahlawan, Surabaya juga dikenal sebagai kota industri. Dengan berbagai masalah dan kesibukannya Surabaya terus melenggang maju di berbagai sektor yang berkembang di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski demikian Surabaya juga tidak lepas dari problema politik yang ada. Warga Surabaya terdiri dari berbagai macam suku dan etnis. Seluruhnya telah hidup berdampingan selama ratusan tahun. Jika ditanya mengenai politik identitas, pasti kita semua akan menjawab dengan jawaban demokratis. Tapi sesungguhnya politik identitas tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Tren yang saat ini menjadi isu yang berkembang adalah mengenai Tionghoa dalam politik. Keikutsertaan Tionghoa dalam politik bukan merupakan hal baru. Namun pandangan dan doktrin yang diterima mengenai Tionghoa hanyalah cocok dengan dunia usaha dan dagang dan tidak cocok dengan Politik masih menjadi alasan umum. Banyak yang mengira bahwa keikutsertaan Tionghoa dalam politik, khususnya dalam pemerintahan adalah sebagai suatu jalan lain bagi mereka untuk mendapat profit sebesar-besarnya. Selain itu pandangan akan mereka yang ikut dalam dunia politik hanyalah mereka yang ingin menyelamatkan aset dan menghindari pajak juga terus disuntikkan kepada kaum muda. Maka jangan heran jika isu Tionghoa dalam politik menjadi isu yang hangat diperbincangkan.

Masyarakat Tinghoa Surabaya sendiri menempati posisi ketiga dalam mayoritas etnis terbesar di Kota Surabaya setelah Jawa dan Madura. Kegiatan mereka terpusat pada kegiatan usaha dan perdagangan. Kegiatan mereka banyak terpusat di daerah Kembang Jepun dan pertokoan Pasar Atom Surabaya.

Politik identitas yang ada di Surabaya sendiri dapat dilihat dari jumlah partisipan Tionghoa dalam pemilihan umum. Baik sebaai calon legislatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun sebagai pemilih. Meski tidak secara terang-terangan dalam memilih calon yang memiliki latar belakang yang sama dengan mereka, banyak dari responden yang mengaku bahwa mereka tak jarang memilih calon yang mereka nggap memiliki kedekatan latar belakang dengan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Erlina Anindya :

> "Saya sendiri melihat politik identitas itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lagi. Setiap orang pasti akan punya daya tarik atau keterikatan tersendiri dengan kelompoknya masing-masing. Jadi pasti ada yang namanya politik identitas. Sayapun kalau memilih diantara calon yang ada dan saya tidak tahu siapa mereka, saya akan memilih yang mana yang nama dan mukanya yang terasa familiar dengan saya, yang benar-benar kelihatan seperti "Arek Suroboyo"."[1]

Jika melihat dari sejarah politik di kota Surabaya, tidak bisa dilepaskan dari campur tangan berbagai etnis dan kelompok di dalamnya. Mulai dari masa kolonialisme Belanda sampai saat ini, masyarakat cenderung bersifat terbuka dan menerima kehadiran etnis lain dengan senang hati. Meskipun ada beberapa kelompok yang masih menganggap remeh atau buruk suatu etnis tertentu, namun jumlah ini tidak sampai menimbulkan hal yang berbau rasisme.

Diantara sikap penerimaan masyarakat Surabaya terhadap etnis lain, banyak masyarakat yang menganggap bahwa memilih calon yang dianggap memiliki kedekatan etnis lebih baik daripada tidak memilih sama sekali. Hal ini menjadi alasan karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa dan bagaimana calon yang ada di dalam kertas suara tersebut bekerja. Meskipun calon tersebut telah melakukan kampanye dan sebagainya. Namun

[1] Wawancara 22 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada beberapa calon yang memang telah memiliki spesifikasi tertentu dan sudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga pada saat pemilu berlangsung, masyarakat akan otomatis memilih calon tersebut. Meskipun calon tersebut tidak memiliki latar belakang yang sama dengan pemilih. Anggota DPRD Kota Surabaya, Baktiono, yang berasal dari etnis Tionghoa, menyatakan bahwa beliau tetap dipilih oleh mayarakat Surabaya sebagi anggota legislatif semenjak tahun 1999 karena kepercayaan masyarakat akan bukti kerja beliau.

> "Masyarakat akan lebih memilih calon dari perjuangannya dan napak tilas calon tersebut. Jika tidak ada prestasi yang didapatkan oleh calon tertentu, maka biasanya masyarakat juga akan enggan memilih calon terebut."[2]

Meskipun praktek politik identitas kadang dianggap sepele oleh masyarakat banyak, namun sebenarnya praktek politik identitas ini juga dapat melihat bagaimana pandangan politik masyarakat berdasarkan etnis di suatu wilayah. Hal ini biasanya diperlukan dalam pemetaan sikap pemilih yang digunakan parpol dan tim sukses untuk meletakkan calon legislatif yang tepat untuk suatu daerah.

Di Surabaya sendiri praktek politik identitas jarang ditemui secara terang-terangan. Meskipun ada, namun jumlahnya tidak sebanyak kota-kota bsar lainnya. Bahkan prakteknya tidak menimbulkan dampak yang begitu besar. Bahkan sejak tahun 1999, Surabaya telah memiliki wakil rakyat yang berasal dari kalangan Tionghoa.

[2] Wawancara 2 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baktiono, merupakan kader PDI-P yang telah berkecimpung sebagai wakil rakyat kota Surabaya sejak tahun 1999. Sebagai "pemain lama" dalam dunia politik Surabaya, beliau paham betul tentang keadaan politik dan politik identitas di kota Surabaya. Etnis Tionghoa memegang peranan penting dalam perkembangan kota Surabaya. Tidak hanya dalam sektor politik, namun sektor perdagangan dan lainnya.

Dalam kancah politik di Surabaya, beliau menganggap bahwa identitas seseorang calon sangat diperlukan sebagai daya tarik kepada pemilih. Tapi kemudian identitas yang dimunculkan tersebut juga harus sesuai dengan visi-misi yang diusung oleh partai yang menaungi. Tidak semena-mena menggunakan identitas assalnya secara mentah-mentah namun mengolahnya menjadi sesuatu yang berkesinambungan.

> "Tentang politik identitas sendiri tidak bisa sebatas kita nilai pada karakter budaya seseorang saja. Dalam politik praktis pun, politik identitas juga berpengaruh. Tapi tetap harus berpegang dan berdasarkan pada partai dan Indonesia. tidak bisa disama-ratakan. Jika saya memandang, politik identitas mempengaruhi politik praktis itu berbeda-beda bagi setiap orang. Tidak mesti satu orang dari golongan tertentu akan memilih orang yang berasal dari golongan yang sama."[3]

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Vinsensius yaitu:

> "Jika saya melihat, politik identitas tiap insan itu kembali pada pribadi masing-masing. Ada mereka yang memang hanya mau memilih dari kalangannya sendiri, namun banyak juga mereka yang memang memiliki keinginan untuk merubah Surabaya menjadi lebih baik, mereka tidak peduli mau warna apa yang diusung atau dari mana dia berasal. Selama dia memiliki kualitas yang baik, maka warga akan memilih dia."

[3] Wawancara 2 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik identitas merupakan hal yang wajar dilakukan. Mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam dinamika politik yang ada di dalamnya yang tidak sedikit menimbulkan banyak pro-kontra menjadikan politik identitas sebagai hal yang wajar. Tentunya kita mengenal adanya solidaritas antar sesama kaum. Banyak dari kita yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan seseorang yang memiliki latar belakang yang sama dengan yang dimiliki. Hal ini juga menjadi alasan kuat akan hal tersebut.

Pandangan lain mengenai politik identitas adalah mengenai cara pandang seseorang akan pilihan politik yang menurut mereka sesuai dengan identitas yang mereka yakini. Dalam hal ini identaitas yang di yakini adalah semacam preferensi politik yang dimiliki. Meskipun orang tersebut berasal dari suatu etnis tertentu, namun apabila preferensi politisnya cenderung mengarah ke arah yang nasionalis dan pembangunan negara, mereka akan cenderung memilih calon yang memiliki program kerja yang baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar belakang yang sama dengan orang tersebut.

Di Surabaya sendiri, masyarakatnya cenderung untuk memilih mereka yang memiliki program kerja atau visi-misi yang cenderung kepada pembangunan kota Surabaya. Hal ini senada dengan pernyataan Lilyana:

> “Saya rasa Surabaya ini kota yang sudah cukup maju dalam bidang politik. Kita semua sudah sadar akan pentingnya politik tanpa memandang ras dan suku. Meskipun ada beberapa pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> memang tidak suka akan kehadiran kelompok tertentu, tapi tetap banyak dari kita yang bisa menerima politik tanpa memandang etnis."[4]

Meski tak jarang banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa dan bagaimana program kerja calon yang maju dalam pemilihan umum. Namun banyak pula yang terlebih dahulu mengecek bagaimana latar belakang dan program calon-calon tersebut melalui laman KPU dan sebagainya.

Selain itu, politik identitas pada era ini dapat tumbuh karena adanya suatu terminologi kekamian. Ideologi kekamian ini adalah suatu kecenderungan bahwa seseorang akan bertidak sejalan dengan oran yang memiliki aliran atau latar belakang yang sama dengan yang dimilikinya. Orang tersebut bahkan tak jarang cenderung menanggap orang lain yang tidak memiliki latar belakang sama atau sealiran dengan mereka sebagai saingan atau bahkan musuh yang harus ditaklukkan.[5]

Maka tak jarang alasan yang muncul jika ditanya masalah memilih calon yang memiliki latar belakang etnis yang sama, banyak masyarakat akan mengatakan bahwa ketertarikan itu ada karena faktor alamiah.

Politik identitas ini bisa dianggap sebagai hal yang baik apabila dengan hal ini dapat membuat partisipasi politik meningkat. Selain itu hal ini baik apabila dibarengi dengan tujuan untuk membawa kesetaraan dan keterwakilan dalam bidang politik. Hal ini sejalan dengan pernyataan AK, salah satu pedagang di pasar Atom Surabaya:

---

[4] Wawancara 15 Mei 2017

[5] Benyamin Molan, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2015), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pada awalnya kita mikir, kita untuk apa ikut serta buat nyoblos kalau akhirnya kebijakan yang ditimbulkan ya gitu-gitu aja? Mereka kan dasarnya bukan dari kalangan kita, jadi untuk memahami kita juga susah. Nah, kalau ada calon yang sama-sama Cina dengan kita, kita punya pemikiran pasti orang ini bisa bela kita juga. Tapi kayaknya kalau melihat masyarakat Surabaya ini, kita lebih membaur sih ya. Ndak ada yang aku Cina, berarti harus milih Cina juga. Buktinya nggak ada kan masalah seperti yang di Jakarta itu. Meskipun kita juga kadang ikut merasakan apa yang dirasakan orang Cina disana, tapi saya lebih bersyukur bahwa Surabaya ini lebih baik di bidang politik dan kebijakannya."[6]

Namun di sisi lain hal ini bisa menjadi hal yang buruk apabila politik identitas ini dibarengi dengan misi-misi tertentu untuk melanggengkan kekuasaan atau untuk membentuk ideologi baru yang menggantikan ideologi yang lama. Hal ini juga menjadi hal yang buruk apabila mereka hanya akan mau mengikuti pemilihan umum apabila menemukan orang yang dianggap memiliki latar belakang yang sama dengan mereka.

Salah satu bentuk politik identitas apabila dilihat dari segi politisi etnis Tionghoa, terwujud dalam peraturan dan kebijakan yang memihak atau menguntungkan warga Tionghoa di dalamnya. Di Surabaya sendiri, politisi yang berasal dari etnis Tionghoa menyatakan bahwa mereka dlam pembuatan kebijakan cenderun untuk memposisikan masyarakat dengan sama rata. Tidak ada pengkhususan bagi etnis tertentu. Bahkan saat masyarakat membutuhkan kehadiran mereka di lapangan, tak jarang anggota DPR yang berasal dari etnis Tionghoa tidak malu untuk membaur dengan masyarakat dari berbagai lapisan. Hal ini serupa denan pernyataan Vinsensius:

[6] Wawancara 9 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Saya merupakan tipikal dewan yang senang terjun ke masyarakat. Saya sangat terbuka dengan semua masyarakat yang datang ke saya. Saya berikan mereka waktu dan catatan tentang apa saja yang mereka keluhkan. Meskipun saya tidak langsung menujukan semua laporan yang ada ke dinas-dinas terkait."[7]

Dalam pandangan masyarakat Tionghoa, politik identitas mereka banyak tergambar dari adanya proses ekonomi yang dijalani. Etnis Tionghoa, tidak hanya di Surabaya, namun juga di berbagai pelosok kota bahkan belahan dunia rata-rata memiliki profesi sebagai pengusaha. Hal ini dikarenakan tradisi nenek moyang mereka di Tiongkok yang menggantungkan kehidupan mereka dari berdagang. Dari kegiatan perdagangan tersebut mereka juga mulai mengenal politik. Hal ini senada dengan pernyataan EV, salah satu pedagang di pasar Atom Surabaya:

> "Jangan salah, meskipun kita berdagang, kita juga main politik di dalamnya. kita juga harus pintar pilih mana *supplier* dan lain-lain. Bahkan untuk mendapat tempat strategis di *mall* atau lahan usaha kita, itu juga butuh politik. Bahkan ini juga jadi semacam tradisi buat kita juga. Kalau kita jeli atau kita sering berhubungan sama sesama Cina, kepercayaan kita sama orang, tidak hanya ke orang Cina saja, itu benar-benar tinggi."

Pasar Atom Surabaya merupakan pertokoan dan pusat perbelanjaan yang terletak di Surabaya Utara. Tempat perbelanjaan ini tidak pernah sepi dari pengunjung, terurtama mereka yang berasal dari etnis Tionghoa. Tidak hanya untuk berbelanja, mereka juga banyak melakukan pertemuan bisnis dan lainnya di lokasi ini.

[7] Wawancara 10 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam pengakuan beberapa pedagang mengenai keterkaitan politik dengan usaha yang dilakukannya, banyaknya pengunjung etnis Tionghoa di pasar Atom ini tidak ada sangkut pautnya dengan preferensi pilihan politik sebagai Tionghoa. Hal ini lebih didasarkan pada lokasi Pasar Atom yang cukup dekat dengan pusat perkumpulan etnis Tionghoa Surabaya, yaitu Kembang Jepun.

Alasan lain adalah karena Pasar Atom yang pedagangnya di dominasi oleh etnis Tionghoa, sehingga memudahkan mereka untuk bertransaksi dan mendapatkan barang yang mereka inginkan. Bahkan pedagang sendiri mengaku pilihan politik mereka cenderung pada calon yang benar-benar terbukti memiliki kemampuan dan bukti nyata dalam membangun Surabaya terlepas dari etnis apa mereka berasal. Namun tak jarang mereka juga mengaku memilih calon yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh AK:

> "Sama sekali tidak ada hubungan politik antara kenapa orang Tionghoa lebih memilih berbelanja di sini. Biasanya mereka belanja disini atau kumpul disini karena memang sini tempat dekat dengan Kya-Kya. Disini mereka juga mau cari makanan atau barang apa yang mereka butuhkan juga ada. Kadang kalau di tempat lain kan sifatnya lebih konvensional. Kalau dulu memang kita sempat suka pilih PKB. Kan Gus Dur itu membela kita sekali. tapi makin kesini, setelah beliau tidak ada, kita melihat bahwa tujuan partai ini tidak sama seperti dulu agi. Makanya kita sekarang pilih mana yang benar-benar bagus. Kadang juga kita dengar dari kawan-kawan lain, misal si A ini bagus, kalau memang benar terbukti, ya kita pilih dia"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Surabaya

Bisa dikatakan bahwa partisipasi politik di Surabaya cukup tinggi. Setiap masyarakat selalu memiliki antusias yang tinggi dalam setiap pemilihan umum. Bahkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 meningkat dibanding dengan pemilu tahun 2009. Data KPU menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat Surabaya dalam pemilu mencapai 60,57 persen. Angka ini melampaui angka tahun 2009 dimana partisipasi pemilih hanya mencapai angka 48 persen saja.

Dari sekian banyak penduduk Surabaya, etnis Tionghoa menjadi satu dari empat etnis besar yang menduduki Surabaya. Etnis tionghoa yang tinggal di Surabaya rata-rata memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Dalam hal partisipasi politik bisa dikatakan etnis Tionghoa memiliki cara tersendiri dalam melakukannya.

Partisipasi politik etnis tionghoa di Surabaya tidak hanya sebatas dalam mengikuti jaannya pemilihan umum saja. Proses politis etnis tionghoa juga merambah sektor-sektor lain seperti sektor keagamaan atau bakti sosial. Mereka tetap berusaha untuk menyuarakan politik tanpa mengganggu jalannya ibadah atau lainnya. Hal ini dikarenakan mereka terkadang masih memiliki sedikit ketakutan akan diskriminasi politik atau kejadian yang berhubungan dengan Tionghoa seperti pada masa lalu. Liliyana menyatakan:

> “Orang cina itu punya semacam kelompok sosial. Dan banyak dari kita ini berpikir seperti ini “apa yang bisa dilakukan politik? Untuk membantu orang. Dengan apa kita bisa membantu orang? Ya dengan cara memberikan uang. Karena memang tradisi di Tionghoa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seperti itu" Maka dari itu banyak kita yang terjun dalam kegiatan bakti sosial.
> Sedangkan masuk dalam dunia politik itu membantu lebih dari sekedar uang. Bisa memberikan bimbingan politik dan sebagainya. Sebenarnya kami ini tidak sepenuhnya tertutup dengan dunia luar. Kami hanya menjaga agar apa yang pernah kakek buyut kita dulu alami saat tahun 1965 ataupun 1998 itu tidak terulang lagi."[8]

Selain itu, dalam politik praktis, tak jarang kita menilai bahwa orang Tionghoa selalu menutup diri dari dunia luar. Hal ini muncul karena partisipasi Tionghoa dalam politik cenderung tertutup. Maka tak jarang saat ada politisi yang berasal dari kalangan Tionghoa muncul, kita cenderung untuk memandang mereka sebelah mata.

Jika kita melihat lebih jeli lagi, etnis Tionghoa cenderung menutup diri dari dunia sosial. Hal ini bukan berarti mereka tidak mau melihat apapun yang ada di sekitar mereka dan hanya memperdulikan kalangannya saja. Menarik diri dari kalangan sosial disini memiliki maksud yaitu mereka lebih memilih untuk menjadi pemain di belakang layar. Mereka tetap aktif dalam kegiatan parpol namun mereka tdak ingin dikenal oleh khalayak umum. Hal ini senada dengan pernayataan S.W. Nugroho :

> "Surabaya masih sangat sedikit etnis Tionghoa yang punya minat dalam bidang politik. Stabilitas dalam politik itu tidak bisa diukur secara ilmiah dan bahkan tidak terduga. Ada berbagai macam alasan kenapa mereka masuk dalam politik. Ada yang karena suka kumpul dsb.
> Banyak dari mereka yang bekerja pada level bawah tanah. Bahkan dalam dunia parpol sekalipun mereka jarang ingin mau diekspos. Hanya beberapa saja yang berani untuk tampil"[9]

[8] Wawancara 15 Mei 2017
[9] Wawancara 25 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan tersebut muncul karena adanya ketidak-tertarikan yang cukup dalam bagi mereka untuk terjun langsung ke dalam dunia politik. Selain itu tidak ada euphoria yang besar untuk menarik sesama Tionghoa untuk ikut serta dalam dunia politik. Banyak dari mereka yang justru lebih tertarik untuk mendalami dunia usaha atau bisnis. Banyak dari mereka yang berpikir bahwa untuk memajukan sebuah negara tidak hanya dengan jalan politik saja. Memajukan negara juga bisa dengan cara lain seperti dalam bisnis, kedokteran dan sebagainya. Seperti yang dinyatakan oleh Kenia :

> "Partisipsi politik Tionghoa sejauh ini yang saya tahu, selain dalam pemilihan umum banyak dari kita yang juga aktif dalam berbagai acara sosial. Saya rasa hal tersebut juga masuk dalam partisipasi politik. Kenapa? Karena kita juga berpikir untuk menjadi aktor politik yang membawa perubahan tidak harus susah payah jadi anggota dewan. Daripada kita berkoar-koar untuk dipilih tapi pada akhirnya tidak menimbulkan hasil apa-apa, kita lebih baik melakukan satu kerja nyata yang jelas akan hasilnya."[10]

B. Politisi Etnis Tionghoa di Surabaya

Kehadiran politisi dari etnis Tionghoa bukan merupakan fenomena yang baru di kota Surabaya. Dalam dewan legislatif kota Surabaya tercatat ada tiga anggota yang berasal dari etnis Tionghoa. Ketiganya memiliki pengalaman yang berbeda dalam bidang politik. Ada yang memang telah lama berkecimpung di dunia politik, dan ada pula yang baru menjabat meskipun sudah mengenal politik sejak lama.

[10] Wawancara 23 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan tanpa alasan, keikutsertaan mereka dalam politik juga memiliki dasar masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Baktiono yang mengaku telah terlibat dalam politik semenjak mengenyam pendidikan menengah atas:

> "Dalam politik saya melihat bahwa banyak ketidak adilan yang kami rasakan pada saat itu. Tidak hanya saya yang sebagai orang Tionghoa saja ataupun kawan-kawan kami sesama Tionghoa. Namun ketidak adilan itu juga diterima oleh masyarakat Indonesia. banyak kelaparan dan ketidaksejahteraan dimana-mana, tapi pemerintah malah diam. Disini muncul inisiatif saya bahwa Indonesia butuh perubahan. Dan perubahan ini tidak akan terlaksana jika kita hanya diam saja. Maka dari itu saya memutuskan untuk terjun dalam dunia politik.[11]

Di sisi lain, Vinsensius yang bisa dibilang baru menjabat sebagai wakil dewan di kota Surabaya menyatakan alasannya untuk terun dalam politik sebagai berikut:

> "Bagi saya terjun dalam dunia keorganisasian dan kemasyarakatan adalah sebuah passion. Setelah reformasi banyak kawan saya yang terjun ke dunia politik. Sebenarnya saya ingin juga bergabung dengan mereka, namun karena orang tua saya, saya tidak bisa ikut dalam hal itu. Karena memang pada saat itu kecenderungan diskriminasi terhadap orang Tionghoa masih sangat terasa. Meskipun demikian saya masih tetap menyimpan keinginan untuk berpolitik.
> Kemudian juga saya juga memiliki keinginan untuk menghapuskan warisan "trauma berpolitik" kepada anak cucu saya. Karena selama ini kami Tionghoa kenapa kami terlihat enggan untuk berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik. Ya karena adanya warisan trauma berpolitik yang diturunkan oleh kakek buyut kami yang merasakan bagaimana kejamnya politik masa lalu."[12]

Dari kedua jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kedua anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari etnis Tionghoa ini memiliki satu keinginan yang sama, yaitu untuk menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Menurut kedua narasumber diatas, meski etnis

[11] Wawancara 10 Juni 2017
[12] Wawancara 5 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tionghoa sudah lebih bebas untuk berekspresi dibandingkan pada saat masa peerintahan Orde Baru, masih ada benih-benih diskriminasi yang ditujukan kepada etnis Tionghoa.

Pandangan mengenai etnis Tionghoa tentang penjajah bermata sipit masih tidak bisa dihindari. Maka tak jarang kehadiran mereka dalam dunia politik lebih banyak dipandang sebelah mata. Meskipun mereka telah terbukti memiliki prestasi di bidang politis, pandangan pribumi mengenai Tionghoa berpolitik kadang tidak bisa dilepaskan dari sentiment-sentimen orde baru yang menganggap bahwa Tionghoa adalah musuh negara.

Selain itu warisan berpolitik orde baru yang menyebabkan adanya "trauma berpolitik" bagi etnis Tionghoa juga merupakan alasan. Kedua narasumber tersebut sama-sama ingin menghilangkan warisan trauma berpolitik tersebut kepada masyarakat terutama mereka yang memiliki latar belakang Tionghoa.

Dalam sejarah politik di Surabaya sendiri, meskipun tekanan yang di dapatkan oleh etnis Tionghoa tidak sebesar seperti di kota lain terutama Jakarta dan Solo, namun tetap saja, banyak etnis Tionghoa yang merasa kurang sreg untuk terjun dalam bidang politik. Jika ada, rata-rata mereka telah memiliki suatu latar belakang keluarga yang sama-sama berkecimpung di dunia politik.

Apabila berbicara mengenai partai politik, etnis Tionghoa selalu dikaitkan dengan agama Kristen, nasionalis, dan modal besar. Maka tak jarang masyarakat menganggap bahwa etnis Tionghoa hanya mau bergabung dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai besar yang berideologi nasionalis. Hal ini karena partai nasionalis cenderung memiliki anggota yang lebih beragam dibanding partai yang berbasis agama. Selain itu keanggotaan mereka dengan partai politik yang besar atau telah memiliki nama dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan suara lebih cepat karena kepercayaan masyarakat kepada partai yang familiar lebih besar daripada partai yang baru terbentuk ataupun partai yang dalam kategori baru.

Dalam penelitian ini, kedua subjek utama berasal dari dua partai yang berbeda. Bapak Vinsensius berada di bawah naungan partai Nasdem, sedangkan bapak Baktiono berada di bawah naungan PDI-P. Keduanya memiliki alasan yang sama mengenai pilihan partai dan identitas yang dimilikinya saat ini. Keduanya kompak mengatakan bahwa mereka sama-sama tidak memiliki alasan identitas dalam memilih parpol. Alasan yang paling utama adalah figur pemimpin parpol, selain itu ideologi parpol juga lebih membawa pengaruh tersendiri bagi mereka. Berikut adalah alasan bapak Vinsensius memilih partai Nasdem:

> "Dalam bermain politik memang kita selalu tidak lepas dari identitas kepartaian kita. Entah merah, kuning, hijau, biru atau apapun. Dan dalam dunia politik juga ada yang dinamakan dengan titipan partai. Nah disini ini kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Jika memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani dan moral perjuangan kita, maka kita harus mengatakan tidak.
> Partai itu diibaratkan seperti kendaraan politik bagi kita. Saya punya tujuan tertentu sehingga saya menumpang dalam kendaran tersebut. Jika dalam perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau saat keinginan partai bertentangan dengan moral

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perjuanagn maka kita juga harus siap dan berani keluar dari partai tersebut."[13]

Sedangkan alasan bapak Baktiono memilih PDI-P adalah sebagai berikut:

> "Tidak ada. Saya bergabung dengan PDI-Perjuangan karena saya melihat bahwa saya memiliki ideologi dan cita-cita yang sama dengan partai ini. Pada dasarnya semua partai sama baiknya. Namun kita bisa memilih mana yang sesuai dengan perjuangan kita."[14]

1. Representasi Kepada Masyarakat dan

Proses representasi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi seorang wakil rakyat. Tidak hanya bagi politisi yang memiliki latar belakang Tionghoa saja. Namun bagi seluruh wakil rakyat, representasi kepada masyarakat dianggap penting. Melalui hal ini mereka dapat membentuk opini baik dan menarik simpati dan keercayaan masyarakat. Sehingga dalam perjalanan politis selanjutnya, masyarakat sudah tahu dan tidak meragukan kinerja mereka.

Dalam representasinya kepada masyarakat Surabaya, kedua subjek utama dalam penelitian ini memiliki pengalaman dan cara yang berbeda untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Surabaya. Vinsensius, sebagai politisi baru di Kota Surabaya memiliki cara sebagai berikut:

> "Saya merupakan tipikal dewan yang senang terjun ke masyarakat. Saya sangat terbuka dengan semua masyarakat yang datang ke saya. Saya berikan mereka waktu dan catatan tentang apa saja yang mereka keluhkan. Meskipun saya tidak langsung menujukan semua laporan yang ada ke dinas-dinas terkait. Kenapa tidak langsung saya teruskan,

[13] Wawancara 9 Mei 2017
[14] Wawancara 14 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> karena posisi saya disini bukan sebagai pengambil keputusan. Posisi saya disini hanya sebagai mengawasi aspirasi dan kemudian menyampaikan ke dinas yang bersangkutan. Sebelumnya saya juga terjun langsung ke masyarakat untuk melihat sejauh apa keluhan yang dialami masyarakat."[15]

Sedangkan Baktiono yang telah menjadi politisi semenjak 18 tahun lalu memiliki cara seperti berikut:

> "Sebagai anggota dewan, saya bisa dibilang bukan orang baru. Saya sudah menjabat sebagai anggota dewan mulai tahun 1999. Dan setiap periode kepegurusan saya, saya selalu berusaha menunjukkan ke masyarakat bahwa kami benar-benar berjuang mendampingi masyarakat dan menjadi corong bagi segala keluhan masyarakat. Kami turun langsung ke lapangan, mendengarkan apa keluh kesah masyarakat, kemudian itu semua kami olah lagi sehingga muncul peraturan-peraturan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Saya juga tidak membedakan masyarakat. Semua warga Surabaya adalah sama."[16]

2. Posisi dalam Pengambilan Keputusan Legislatif

Dalam proses pengambilan kebijakan di dewan legislatif mereka memiliki cara dan pandangan tersendiri. Terlepas dari identitasnya sebagai seorang Tionghoa, mereka juga memilih untuk mengikuti tupoksi yang ada. Pendapat Vinsensius dalam hal ini adalah sebagai berikut:

> "Saat berbicara mengenai keputusan maka kami tidak bisa berdiri masing-masing. Keputusan datang dari politik kolegia. Jika berbicara kekuasaan maka kursi terbanyak itulah yang bisa mengarahkan dan mengambil keputusan. Dan saya meskipun berasal dari partai yang memiliki porsi kursi yang minim, dan kemudian juga dari identitas saya yang berasal dari tionghoa juga dalam pengambilan keputusan saya juga ikut andil meski peran saya kecil. Namun demikian saya juga merupakan bagian dari sebuah keputusan.
> Dalam menentukan keputusan ada saja yang kadang tidak sesuai hati nurani dan moral perjuangan dan tidak berintegritas. Disitu saya hadir

[15] Wawancara 9 Mei 2017
[16] Wawancara 6 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> untuk menentang. Meskipun tentangan saya itu memiliki resiko, namun jika tujuan saya adalah baik, meskipun kecil tetap saya akan lakukan."[17]

Sedangkan Baktino memiliki jawaban sebagai berikut:

> "Dalam pengambilan keputusan kami menggunakan prinsip musyawarah mufakat. Jadi saya meskipun berperan aktif di dalam pengambilan keputusan, saat putusan sudah turun, saya juga harus menghormati. Sehingga dalam forum terjadi harmonisasi dan tidak ada yang namanya diskriminasi."[18]

Masyarakat Surabaya dengan kehadiran politisi Tionghoa di tengah-tengah mereka, tidak banyak yang mengetahui tentang keberadaan politisi Tionghoa tersebut. Mereka justru lebih familiar dengan sosok seperti bu Risma atau sosok lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya representasi yang dirasakan oleh masyarakat Surabaya tentang kehadiran mereka sebagai wakil rakyat. Di sisi lain, banyak masyarakat Surabaya yan cenderung bersikap apatis terhadap gejala dan proses politik yang ada di Surabaya. Jarang dari masyarakat Surabaya yang sadar politik kecuali jika terjadi isu yang sangat besar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Erlina:

> "saya selama menjadi penduduk Surabaya belum pernah merasakan dampak yang signifikan dari kehadiran politisi etnis Tionghoa. Bahkan bisa dibilang saya sendiri juga tidak mengetahui jika ada politisi yang berasal dari kalangan Tionghoa."[19]

Pernyataan tersebut cukup berbanding terbalik dengan pernyataan politisi lain yang juga berkecimpung di dunia politik Surabaya. Banyak dari mereka yang menganggap ehadiran etnis Tionghoa di kancah politik ini justru

---

[17] Wawancara 9 Mei 2017
[18] Wawancara 22 April 2017
[19] Wawancara 18 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa suasana baru bagi politik Surabaya. Meskipun Surabaya sendiri dianggap menjadi kota yang ideal dalam hal politik identitas bagi mereka, kehadiran politisi Tionghoa dirasa bisa menjadi wadah aspirasi tidak hanya bagi sesama Tionghoa saja. Hal ini disampaikan oleh Tirmidi sebagai berikut:

> "Banyak dampak yang bisa kita rasakan. Seperti sekarang ini apalagi di Jakarta dengan isu politik yang sedang panas-panasnya. Etnis Tionghoa yang dulu ogah-ogahan dengn politik sekarang sudah berani muncul dan menyuarakan pendapatnya. Bahkan bisa kita lihat bagaimana orang bisa bersimpati dengan mereka dan sebagainya. Hal ini menandakan mereka punya efek yang bukan main-main.
> Malahan kalau saya melihat etnis Tionghoa ini punya gaya sendiri yang kadang membuat gebrakan-gebrakan yang kadang berbenturan dengan anggota lain. Aksudnya disini adalah mereka ini punya pemikiran sendiri bagaimana bagusnya suatu hal itu bisa berjalan. Kadang banyak anggota itu yang mainstream, pokonya ikut saja apa keputusan dari pusat, dalam artian kebijakan yang bersumber dari partai sendiri. Kan ada seperti itu. Tapi kebanyakan Tionghoa ini tidak. Mereka punya pemikiran sendiri. Meski kadang endingnya mereka harus ikut suara terbanyak."[20]

Kehadiran etnis Tionghoa dalam politik tidak semata-mata hanya ingin menghadirkan kesetaraan politik antara pribumi dengan Tionghoa saja. Namun kehadiran mereka juga dianggap menjadi semangat persatuan bagi masyarakat Surabaya. Dengan kehadiran mereka sebagai wakil rakyat pun diharapkan bisa menghapuskan diskriminasi atau pandangan buruk tentang Tionghoa berpolitik yang selama ini masih terus membayangi masyarakat luas.

Bahkan isu yang masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia adalah mengenai politik identitas dan masyarakat Tionghoa. Dua hal ini selalu berbenturan dengan masalah agama terutama Islam.

[20] Wawancara 10 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberagaman yang seharusnya menjadi perekat kebangsaan, malah disalahgunakan oleh sebagian pihak yang ingin menguntungkan satu pihak. Sehingga sengaja membuat isu-isu politis yang berkaitan dengan etnis. Padahal semboyan yang membuat Indonesia mendapatkan banyak pujian dari negara lain adalah mengani berbeda tapi tetap satu jua-nya.

Meskipun dengan berbagai dilematika yang didapatkan mengenai politik identitas, kehadiran politisi Tionghoa dalam politik kota Surabaya menjadi hal yang bisa dianggap sebagai angin segar bagi kemajuan politis Indonesia. alasannya karena meskipun jumlah mereka sangat terbatas dibanding dengan politisi yang berasal dari Jawa atau pribumi, namun kinerja mereka sebagai wakil rakyat tidak perlu diragukan lagi. Selain pada kebijakan-kebijakan yang dibuat, sikap kepemimpinan mereka yang dianggap lain daripada yang lain juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Surabaya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tirmidi:

> "Kehadiran mereka juga membawa ide-ide baru bagi kancah politik. Jika sebelumnya kita cuma tahu politik yang sifatnya partiarki, hanya mengiyakan apa yang dikatakan atasan karena alasan balas budi atau lainnya. Mereka bisa dibilang berbeda. Mereka punya gaya dan pemikiran sendiri. Kan banyak kita tahu bahwa mereka biasanya individualis, mereka juga seperti itu namun dalam artian yang positif. Individualisme yang mereka miliki ini maksudnya mereka selalu punya suara yang beda daripada yang lain. Contohnya saat semua orang setuju untuk melakukan hal tertentu pada suatu wilayah, bisa jadi satu anggota Tionghoa ini bilang tidak karena alasan tertentu. Atau saat anggota lain setuju untuk mendapat tunjangan atau malah mereka yang meminta tunjangan itu, si anggota ini tidak meminta atau malah menolaknya."[21]

[21] Wawancara 10 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pernyataannya Emanuel Castells berpendapat bahwa politik identitas ini dapat menjadi suatu alat perjangan yang digunakan oleh suatu etnis tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap sebagai suatu ketidakadilan politik. Jika dihubungkan dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan maka ditemukan korelasi antara pernyataan Castells dengan hal tersebut.

Meskipun terkesan dengan nasionalisme dan sebagainya, dorongan politisi Tionghoa untuk membawa etnisnya lepas dari diskriminasi politik dan warisan trauma berpolitik juga kuat. Mereka memiliki anggapan bahwa menjadi pelopor akan lebih baik daripada harus terus menyalahkan keadaan atau sistem yang sedang berlaku. Maka mereka lebih memilih untuk menjadi contoh bagi masyarakat Tionghoa lainnya bahwa politik itu tidak hanya ajang untuk mendapatkan kekuasaan saja tapi juga upaya untuk membangun bangsa.

Selain itu mereka juga berupaya memberitahukan kepada khalayak luas bahwa kehadiran Tionghoa dalam dunia politik tidak untuk mencari keuntungan pribadi atau untuk menyelamatkan aset seperti yang selama ini didoktrinkan. Karena dalam politik mereka tidak hanya memperjuangkan kesetaraan bagi etnisnya saja, namun mereka juga erusaha untuk memajukan negara melalui politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam analisa bab IV, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Politik identitas dianggap sebagai hal yang lumrah dan manusiawi dilakukan, representasi seorang politisi juga berpengaruh dalam mendukung sepak terjangnya dalam politik. Masyarakat akan lebih mengapresiasi politisi berdasarkan apa yang telah mereka lakukan untuk kemajuan dibandingkan dengan hanya sebatas memandang latar belakang semata. Politik identitas dapat muncul karena kurangnya pengetahuan tentang calon-calon yang maju dalam pemilu. Meskipun mereka telah melakukan kampanye dan sebagainya, sikap apatis masyarakat terhadap politik praktis juga sangat kuat. Banyak dari masyarakat yang menilai bahwa politik hanya buang-buang waktu dan politik tidak bisa menyelesaikan masalah masih terus ada di benak masyarakat. Sehingga pilihan untuk melakukan politik identitas menjadi pilihan terakhir.
2. Meskipun tak jarang para politisi Tionghoa tersebut menemui adanya diskriminasi karena latar belakang yang dimiliki, mereka tidak pernah menyerah. Dalam kegiatan politiknya, mereka harus bersikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesional dan bersikap sesuai tupoksi yang telah ada. Dalam mengambil keputusan mereka selalu berusaha untuk bersikap imbang dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa memandang latar belakang yang diusung.

3. Representasi terhadap masyarakat merupakan suatu hal yang vital bagi setiap politisi. Hal ini juga berlaku bagi politisi etnis Tionghoa di Surabaya. Dalam proses pendekatan terhadap masyarakat, mereka mencoba untuk terjun langsung dan bersikap terbuka serta kooperatif terhadap aduan yang masuk. Mereka juga berusaha untuk memberikan pengetahuan politik terhadap masyarakat tanpa memandang latar belakangnya pula.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan. Maka peneliti mengajukan bebeberapa saran sebagai berikut:

1. Politik identitas itu tidak hanya muncul karena alasan aktor politik saja, namun pemilih juga berperan aktif dalam terjadinya kegiatan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ditemukan bahwa masyarakat banyak yang bersikap acuh akan keadaan politik yang ada di wilayahnya sendiri. Mereka baru mau berekasi apabila kejadian tersebut sudah menjadi viral.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendidikan politik sebaiknya perlu dilakukan tidak hanya di sekolah-sekolah saja namun juga di berbagai instansi atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Hal ini dikarenakan instansi atau kelompok sosial akan lebih familiar dengan masyarakat. Sehingga dalam penyampaiannya akan lebih mudah. Amsyarakat akan lebih paham tentang politik dan pemaknaan akan politik identitas, sehingga wawasan mereka lebih terbuka dan kesempatan untuk melakukan politik kebangsaan lebih terbuka lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Zein, Abdul Baqir. *Etnis Cina Dalam Proses Pembauran di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Insan, 2000)

Liliweri, Alo. *Prasangka&Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yokyakarta: LKiS, 2005)

Maarif, Ahmad Syafii. "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita" (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012)

Perkasa, Adrian. Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit, (Yogyakarta: Penerbit Ombah, 2012)

Noordjanah, Andjarwati. *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, (Semarang: Mesiass, 2004)

Rosado, Caleb. *"Toward a Definition of Multiculturalism"*, *Journal for Change in Human System*, (Oktober, 1996)

Mahfud, Choirul. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Setijadi, Charlotte. *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia : Changing Identity Politics and The Paradox of Sinification*, Perspective No. 12

Wu-Ling, Chong. *Local Politics and Chinese Indonesian Bussiness in Post-Suharto Era*, Southeast Asian Studies Vol. 04, No.03, 2015

Catatan Tionghoa di Surabaya oleh pengurus INTI Surabaya

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Data Partai Nasdem 2014-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

Adrian, Fikri. Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)

H.A.R. Tilaar. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Jumaidi. "Keterwakilan Etnis Dalam Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru", Jurnal Demokrasi dan Otonomi daerah, Vol. 11, 2013

J. Babari dan Albertus Sugeng. *Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Gandi, 1999)

Yuanzhi, Kong. *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005), 23-25.

Salim, Kamaruddin. "Politik Identitas di Maluku Utara" Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 11, No. 02, 2015

Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2010)

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2009)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010)

La Ode. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik* (Jakarta: Yayasan Obor , 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suryadinata, Leo. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: LP3ES, 2002)

Suryadinata, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987)

Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa*, (Jakarta: LP3ES, 2002)

Suryadinata, Leo. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia* 1900-2002, (Jakarta: LP3ES, 2002),

Hikam, Muhammad. *Politik Kewarganegaraan: Landasan Pendemokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

Purwanto. "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif", Jurnal Review Politik Vol. 05, No. 01, Juni 2015

Parker, Richard. "Five Theses On Identity Politics", Harvard Journal of Law & Public Policy Vol. 29, No. 01, 2005

Suhartono. Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Turner, Sarah. *Speaking Out: Chinese Indonesian After Suharto*, Asian Ethnicity Vol. 04 No. 03

Lukmantoro, Triyono. *Kematian Politik Ruang* (Jakarta: Kompas, 2007)

Abdillah, Ubed. Politik Identitas Etnis :Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, (Magelang: Transmedia Pustaka, 2002)

Liem, Yusie. *Prasangka Terhadap Etnis Cina* (Jakarta: Djambatan, 2000)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/politikus (Kamis, 10 Nopember 2016, 19.00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiono, Benny G. http://lkassurabaya.blogspot.co.id/2007/07/cina-tionghoa-dan-tiongkok.html “Cina, Tionghoa dan Tiongkok” (Kamis, 10 Nopember 2016, 18.55)

http://nurhibatullah.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-jenis-dan-tujuan-studi-kasus.html (Kamis, 13 Oktober 2016, 19.45)

https://asropi.wordpress.com/tag/eksplanatif/ (Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 20.15)

http://aasiapasific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/04/striving-for-safety/

kbbi.web.id/etnis, (diakses pada 20 Maret pukul 21.46)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id